



LAPORAN AKTUALISASI

Optimalisasi Tranformasi Digital

Biro Persidangan II DPR RI

Melalui Perancangan Konten Interaktif MISS ROSIDA

Disusun oleh:

Nama	: Jacko Ryan, S.IP.
NIP	:199907032025061001
Unit Kerja	: Biro Persidangan II
Jabatan	: Analis Kebijakan Ahli Pertama

PELATIHAN DASAR CPNS

GOLONGAN II DAN III ANGKATAN XVI

SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

TAHUN 2025

LEMBAR PENGESAHAN EVALUASI AKTUALISASI

Optimalisasi Tranformasi Digital Biro Persidangan II DPR RI Melalui Perancangan Konten Interaktif MISS ROSIDA

Nama : Jacko Ryan, S.IP.
NIP 199907032025061001
Unit Kerja : Biro Persidangan II
Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Pertama

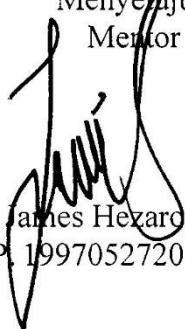
Telah diseminarkan Evaluasi Aktualisasi pada
31 Oktober 2025

Mengetahui,
Coach



Izzaty, S.T., M.E.
NIP.197712052009122001

Menyetujui,
Mentor



James Hexaro, S.M.
NIP. 199705272019031001

Mengetahui,
Penguji



Hikmah, S.Pd., M.Si.
NIP. 197407202000032001

KATA PENGANTAR

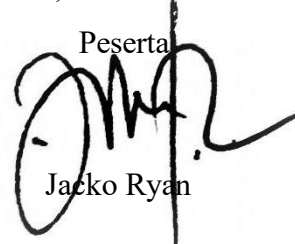
Segala puji penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Aktualisasi dalam rangka Pelatihan Dasar CPNS Golongan II dan III Angkatan XVI Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2025. Dengan penuh hormat, penulis menyampaikan apresiasi kepada berbagai pihak yang telah membantu serta memberikan dukungan dalam penyusunan Rancangan Aktualisasi ini:

1. Bapak Djustiawan Widjaya, S.Sos., M.A.P., selaku Kepala Biro Persidangan II yang telah memberikan dukungan penuh kepada penulis dalam mengikuti Pelatihan Dasar CPNS Golongan III Angkatan XVI Tahun 2025;
2. Bapak James Hezaro, S.M sebagai mentor yang telah meluangkan waktu, serta memberikan pemikiran, arahan, dan masukan berharga untuk penyusunan Rancangan Aktualisasi ini.;
3. Ibu Izzaty, S.T., M.E. sebagai *coach* yang telah membimbing, memberi masukan, serta mendampingi penulis dalam meningkatkan mutu Rancangan Aktualisasi ini;
4. Ibu Yuni Sudarwati, S.IP., M.Si. sebagai penguji Rancangan Aktualisasi dan Ibu Hikmah, S.Pd., M.Si. sebagai penguji Aktualisasi atas waktu, bimbingan, serta masukan berharga yang telah diberikan demi kesempurnaan karya ini.
5. Seluruh Staf di lingkup Biro Persidangan II yang menjadi rekan kerja sekaligus mendukung pelaksanaan kegiatan aktualisasi di satuan kerja penulis;
6. Rekan-rekan Analis Kebijakan serta Angkatan XVI Latsar CPNS yang senantiasa memberi semangat, motivasi, serta inspirasi sepanjang rangkaian pelatihan;

Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan Laporan Aktualisasi ini.

Jakarta, 27 Oktober 2025

Peserta



Jacko Ryan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang.....	1
2. Dasar Hukum	3
3. Tujuan	5
4. Manfaat	5
BAB II PROFIL ORGANISASI DAN JABATAN	7
A. Visi dan Misi Organisasi	7
B. Struktur Organisasi.....	9
C. Tugas dan Fungsi Jabatan Peserta	10
BAB III PENETAPAN ISU PRIORITAS.....	12
A. Identifikasi Isu	12
A.1 Mekanisme Koordinasi Internal Antarbagian dalam Biro Persidangan II.....	12
A.2 Optimalisasi Transformasi Digital dalam Mendukung Kinerja Biro Persidangan II.....	13
A.3 Tingkat Partisipasi dan Representasi Substansial Masyarakat dalam Proses Legislasi.....	14
B. Penetapan Isu Prioritas	20
B.1 Teknik Tapisan Isu.....	20
B.2 Pemilihan Isu Prioritas	23
C. Analisis Isu	24
D. Gagasan Pemecahan Isu	27

BAB IV RANCANGAN AKTUALISASI.....	30
A. Matriks Rancangan Aktualisasi	30
B. Jadwal Rencana Kegiatan	34
 BAB V PELAKSANAAN AKTUALISASI.....	36
A. Jadwal Pelaksanaan Aktualisasi	36
B. Penjelasan Tahapan Kegiatan.....	38
C. <i>Stakeholder</i>	60
D. Kendala dan Strategi Menghadapi Kendala	61
E. Analisis Dampak	62
 BAB VI PENUTUP.....	63
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	64
 DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel III.1 Rekapitulasi Deskripsi Isu	16
Tabel III.2 Kriteria Penilaian dan Skoring	20
Tabel III.3. AKPL Isu Pertama: Mekanisme Koordinasi Internal Antarbagian	21
Tabel III.4 AKPL Isu Kedua: Optimalisasi Transformasi Digital.....	22
Tabel III.5 AKPL Isu Ketiga: Partisipasi Publik.....	22
Tabel III.6 Skoring Tiga Isu Berdasarkan Teknik AKPL.....	23
Tabel III.7 Keterkaitan Isu dengan Gagasan Penyelesaian Isu.....	29
Tabel III.8. Analisis Tahapan Gagasan Kreatif Berdasarkan Metode POAC	29
Tabel IV.1 Matriks Rancangan Aktualisasi Pelatihan Dasar CPNS	30
Tabel IV.2 Jadwal Rencana Kegiatan	34
Tabel V.1 Jadwal Pelaksanaan Aktualisasi	36
Tabel V.2 Informasi Responden.....	42
Tabel V.3. Analisis <i>Engagement Rate</i> (ER) 6 Episode Miss Rosida	50
Tabel V.4. <i>Story Board</i> Video Konten Interaktif Miss Rosida	57
Tabel V.5. Tabel Perbandingan Optimalisasi Konten Miss Rosida	59
Tabel V.6 Usulan Konten Miss Rosida ke Depan	60
Tabel V.7. Pemetaan <i>Stakeholder</i>	61
Tabel V.8. Pemetaan Kendala dan Strategi Penyelesaian	61

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1. Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal DPR RI.....	9
Gambar II.2. Struktur Organisasi Deputy Bidang Persidangan.....	10
Gambar II.3. Struktur Organisasi Biro Persidangan II.....	10
Gambar III.1. Analisis Isu Berdasarkan Metode <i>Fishbone Diagram</i>	26
Gambar V.1. Proposal Inovasi AIRA.....	38
Gambar V.2. Produk Isu Sepekan Minggu ke-4 September 2025	39
Gambar V.3. Wawancara dengan Pegawai Biro Hukum	41
Gambar V.4. Wawancara dengan Salah Satu Penulis Info Sepekan	41
Gambar V.5. Informasi Umum.....	43
Gambar V.6. Kualitas Konten	44
Gambar V.7. Masukan dan Saran.....	45
Gambar V.8. <i>Wordclouding</i> Hasil Survei	46
Gambar V.9. <i>Wordclouding</i> Hasil Survei (2).....	47
Gambar V.10. <i>Wordclouding</i> Hasil Survei (3).....	49

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sekretariat Jenderal DPR RI adalah unsur penunjang yang memiliki tanggung jawab strategis dalam mendukung pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPR RI. Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Setjen DPR RI, Biro Persidangan II berperan sebagai unit kerja yang memberikan dukungan teknis dan administratif bagi penyelenggaraan persidangan, khususnya yang terkait dengan kegiatan Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Biro Persidangan II tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga dituntut untuk menghadirkan dukungan informasi yang akurat, transparan, dan mudah diakses oleh publik. Dukungan tersebut sangat penting karena berkaitan langsung dengan kualitas keterbukaan DPR RI dalam melaksanakan peran sebagai lembaga perwakilan rakyat.

Dalam beberapa tahun terakhir, tuntutan masyarakat terhadap DPR RI semakin tinggi. Masyarakat menuntut transparansi, keterbukaan informasi, dan ruang partisipasi publik yang lebih luas. Harapan tersebut sejalan dengan arah kebijakan reformasi birokrasi yang menekankan pentingnya transformasi digital dalam modernisasi layanan publik. Hal ini ditegaskan melalui beberapa regulasi seperti Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan PermenPANRB Nomor 11 Tahun 2023 tentang Manajemen Kinerja ASN. Regulasi-regulasi tersebut menekankan bahwa transformasi digital dapat mengubah paradigma tata kelola birokrasi agar lebih responsif, transparan, dan partisipatif.

Namun, implementasi transformasi digital pada Biro Persidangan II masih menghadapi sejumlah tantangan. Dari sisi sumber daya manusia, kemampuan pegawai masih terbatas bila dibandingkan dengan beban kerja yang harus ditangani. Dengan personel yang relatif sedikit, Biro Persidangan II harus melayani tujuh AKD secara bersamaan sehingga memerlukan perhatian lebih. Selain itu, kompetensi pegawai dalam bidang teknologi informasi, khususnya pemanfaatan kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*), masih perlu ditingkatkan sehingga belum mampu menjawab seluruh kebutuhan organisasi. Dari aspek teknologi dan infrastruktur, aplikasi digital yang digunakan masih memiliki keterbatasan baik dari sisi fitur

maupun kapasitas. Biaya penggunaannya pun relatif tinggi, sehingga efektivitasnya belum optimal. Kondisi ini menyebabkan pemanfaatan teknologi digital masih berada pada level dasar, sehingga proses pelayanan dan pengelolaan data belum efisien sebagaimana diharapkan.

Biro Persidangan II telah mengembangkan MISS ROSIDA sebagai sarana komunikasi publik. Kehadiran media ini merupakan instrumen penting dalam mendukung keterbukaan informasi persidangan DPR RI. Namun, format konten yang tersedia masih cenderung bersifat satu arah. Informasi memang tersampaikan tetapi ruang partisipasi publik untuk memberikan masukan, tanggapan, maupun interaksi masih terbatas. Padahal, jika dikelola secara interaktif, MISS ROSIDA dapat menjadi media yang bukan hanya menyebarkan informasi, melainkan juga membangun ruang dialog yang lebih luas.

Kondisi ini menimbulkan tantangan yang nyata. Pertama, keterbatasan inovasi dalam format membuat MISS ROSIDA belum sepenuhnya menarik perhatian publik luas dengan pola komunikasi digital yang interaktif. Kedua, sistem evaluasi yang terstruktur belum maksimal sehingga efektivitas konten sulit diukur. Data partisipasi publik melalui komentar, survei, maupun engagement di media sosial belum dijadikan acuan untuk menilai kualitas konten. Ketiga, budaya kolaboratif belum sepenuhnya memanfaatkan potensi sinergi lintas pihak, baik antar staf maupun dengan masyarakat sebagai penerima layanan.

Transformasi digital membuka peluang besar untuk menjawab tantangan tersebut. Perancangan konten interaktif diharapkan membuat kualitas MISS ROSIDA dapat ditingkatkan dengan memanfaatkan teknologi digital, misalnya melalui QR Code yang terhubung ke survei daring, pengolahan isu aktual dengan bahasa populer, hingga narasi singkat yang ditutup dengan pertanyaan terbuka untuk mendorong partisipasi publik. Pola ini akan membuat masyarakat tidak hanya pasif menerima informasi, tetapi juga aktif memberikan tanggapan dan masukan.

Usulan optimalisasi ini sejalan dengan nilai-nilai dasar ASN BerAKHLAK. Perencanaan kerja yang jelas dan terukur mencerminkan prinsip Akuntabel. Penyajian informasi yang ringkas, substantif, dan mudah dipahami menunjukkan ASN yang Kompeten. Keterbukaan terhadap masukan publik mencerminkan sikap Harmonis dan Kolaboratif. Pemanfaatan teknologi digital secara inovatif memperlihatkan sifat Adaptif, sementara kepatuhan pada arahan pimpinan serta etika komunikasi mencerminkan Loyalitas. Seluruh nilai ini menjadi landasan etis dan moral dalam

pelaksanaan kegiatan aktualisasi. Selain itu, kegiatan ini mendukung agenda Manajemen ASN serta penguatan prinsip SMART ASN. Optimalisasi MISS ROSIDA menuntut ASN menguasai keterampilan digital (*digital skills*) dalam penyusunan, analisis, dan evaluasi konten. Penerapan budaya digital (*digital culture*) tercermin melalui kolaborasi lintas pihak dan kebiasaan membangun dialog publik yang sehat. Aspek etika digital (*digital ethics*) dijalankan dengan menjaga kualitas komunikasi agar tetap sopan, bertanggung jawab, dan sesuai kode etik profesi ASN. Penguatan budaya transparansi melalui evaluasi berbasis data juga sejalan dengan prinsip akuntabilitas modern berbasis *evidence-based policy*.

Diharapkan optimalisasi ini berkontribusi langsung terhadap visi dan misi Setjen DPR RI, khususnya dalam memperkuat dukungan persidangan yang profesional, modern, dan akuntabel, serta perwujudan parlemen modern sebagaimana termuat dalam Renstra DPR dan Setjen DPR Tahun 2025-2029. Melalui konten interaktif, DPR RI dapat menghadirkan wajah lembaga legislatif yang lebih terbuka, transparan, dan dekat dengan masyarakat. Hal ini penting untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap DPR RI sekaligus memperkuat legitimasi lembaga dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran. Dengan demikian, diusulkan kegiatan aktualisasi berupa **Optimalisasi Transformasi Digital Biro Persidangan II DPR RI melalui Perancangan Konten Interaktif MISS ROSIDA.**

B. Dasar Hukum

Dasar hukum yang menjadi landasan untuk pelaksanaan Pelatihan Dasar CPNS Angkatan XVI dan penyusunan Rancangan Aktualisasi ialah sebagai berikut.

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Pasal 4 dan 34 menegaskan tentang asas perilaku pelaku pelayanan publik yang sejalan dengan Manajemen ASN dan SMART ASN);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Pasal 10 terkait AAUPB yang sejalan dengan core values BerAKHLAK & Bab XI terkait pembinaan dan pengembangan administrasi pemerintahan);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Pasal 34 & 34A mengatur tentang pelaksanaan prajab bagi CPNS);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2024 tentang Jabatan Fungsional di Bidang Pengembangan Kapasitas dan Pembelajaran Aparatur Sipil Negara;
7. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024;
9. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
10. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 581/K.1/PDP.07/2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil;
11. Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 1484/SEKJEN/2024 tentang Penetapan Hasil Analisis Jabatan dan

Analisis Beban Kerja pada Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

12. Surat Deputi Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Kapasitas ASN Nomor: 2766/K.1/PDP.03.5 tentang Diskresi Latsar CPNS Lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI.

C. Tujuan

Tujuan dari penyusunan rancangan aktualisasi ini antara lain sebagai berikut.

1. Memastikan CPNS mampu mengintegrasikan dan mengimplementasikan nilai dasar ASN Ber-AKHLAK dalam melaksanakan tugas dan fungsi jabatannya;
2. Mendorong CPNS untuk mengaplikasikan nilai-nilai SMART ASN dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab jabatannya, sehingga dapat meningkatkan kinerja dan produktivitas;
3. Memampukan CPNS untuk mengaktualisasikan nilai-nilai yang terkandung dalam undang-undang terkait ASN, sehingga dapat menjalankan peran dan tanggung jawab mereka sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

D. Manfaat

Manfaat pelaksanaan aktualisasi dalam pelatihan dasar CPNS dapat dibagi menjadi manfaat bagi peserta pelatihan dan manfaat bagi unit kerja sebagai berikut.

1. Manfaat bagi Peserta Pelatihan (Penulis)
 - Penulis mendapatkan kesempatan untuk menginternalisasi nilai-nilai dasar ASN BerAKHLAK dalam praktik kerja sehari-hari.
 - Penulis mengalami peningkatan kompetensi, khususnya dalam pemanfaatan teknologi, pengembangan ide-ide inovatif, serta keterampilan berpikir kritis dan analitis.
 - Penulis mendapatkan pengalaman langsung dalam mengidentifikasi masalah, menyusun solusi, serta mengimplementasikannya secara nyata di lingkungan kerja.
 - Penulis mengembangkan kemampuan berkolaborasi dan berkomunikasi secara efektif, baik di dalam unit kerja maupun dengan pemangku.

- Penulis dapat mendukung agenda reformasi birokrasi dan pembangunan budaya kerja ASN yang profesional, modern, dan adaptif.

2. Manfaat bagi Unit Kerja (Biro Persidangan II)

- Unit kerja mendukung pencapaian visi dan misi unit kerja dengan memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas layanan dan kinerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagai *supporting system* bagi DPR RI.
- Unit kerja memperoleh inovasi baru yang dapat dijadikan solusi atas tantangan yang dihadapi, khususnya dalam meningkatkan efektivitas komunikasi publik dan keterbukaan informasi.
- Unit kerja dapat memperkuat budaya kerja kolaboratif dan pemanfaatan teknologi, sehingga mendorong terwujudnya transformasi digital yang sejalan dengan arah kebijakan reformasi birokrasi.
- Unit kerja mendapatkan nilai tambah berupa meningkatnya kepercayaan publik serta citra positif lembaga di mata masyarakat.

BAB II

PROFIL ORGANISASI DAN JABATAN

A. Visi dan Misi Organisasi

Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Setjen DPR RI) merupakan sistem pendukung DPR RI untuk memperlancar pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI serta berkedudukan sebagai kesekretariatan lembaga. Setjen DPR RI dibentuk berdasarkan Pasal 413 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019. Setjen DPR RI mempunyai tugas mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI di bidang persidangan, administrasi, dan keahlian. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Setjen DPR RI menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di lingkungan Sekretariat Jenderal;
- b. koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal;
- c. perumusan kebijakan, pembinaan, dan pelaksanaan dukungan persidangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- d. perumusan kebijakan, pembinaan, dan pelaksanaan dukungan administrasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- e. perumusan kebijakan, pembinaan, dan pelaksanaan dukungan keahlian kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- f. perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengawasan intern di lingkungan Sekretariat Jenderal;
- g. perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengolahan data dan pelayanan informasi, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, pelaksanaan pembinaan jabatan fungsional, serta dukungan tertentu pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal;
- h. pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; dan
- i. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Sebagai organisasi pendukung DPR RI, Setjen DPR RI dalam Renstra 2025-2029 menetapkan Visi “Terwujudnya Sekretariat Jenderal DPR RI yang Modern untuk Mendukung Tercapainya Visi DPR RI” dan Misi “Mewujudkan Sekretariat Jenderal DPR RI yang Modern Melalui Dukungan Persidangan, Administrasi, Keahlian, dan Pengawasan Internal untuk Memperlancar Pelaksanaan Fungsi dan Peran DPR RI” serta “Mewujudkan Tata Kelola Kelembagaan Sekretariat Jenderal DPR RI yang Berintegritas dan Akuntabel dalam Kerangka Reformasi Birokrasi sebagai Sistem Pendukung DPR RI” .

Sekretariat Jenderal DPR RI dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal. Sekretariat Jenderal DPR terdiri atas Deputy Bidang Persidangan, Deputy Bidang Administrasi, Badan Keahlian, dan Inspektorat Utama. Deputy Bidang Persidangan secara administratif berada di bawah Sekretariat Jenderal (Perpres No. 26 tahun 2020). Deputy Bidang Persidangan memiliki Visi “Menjadi Deputy Bidang Persidangan yang Profesional dan Modern dalam mendukung Visi Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia”. Serta Misi “Memberikan dukungan dan pelayanan prima bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Melaksanakan tata kelola kelembagaan pemerintahan yang profesional, baik, dan bersih di lingkungan Deputy Bidang Persidangan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.”

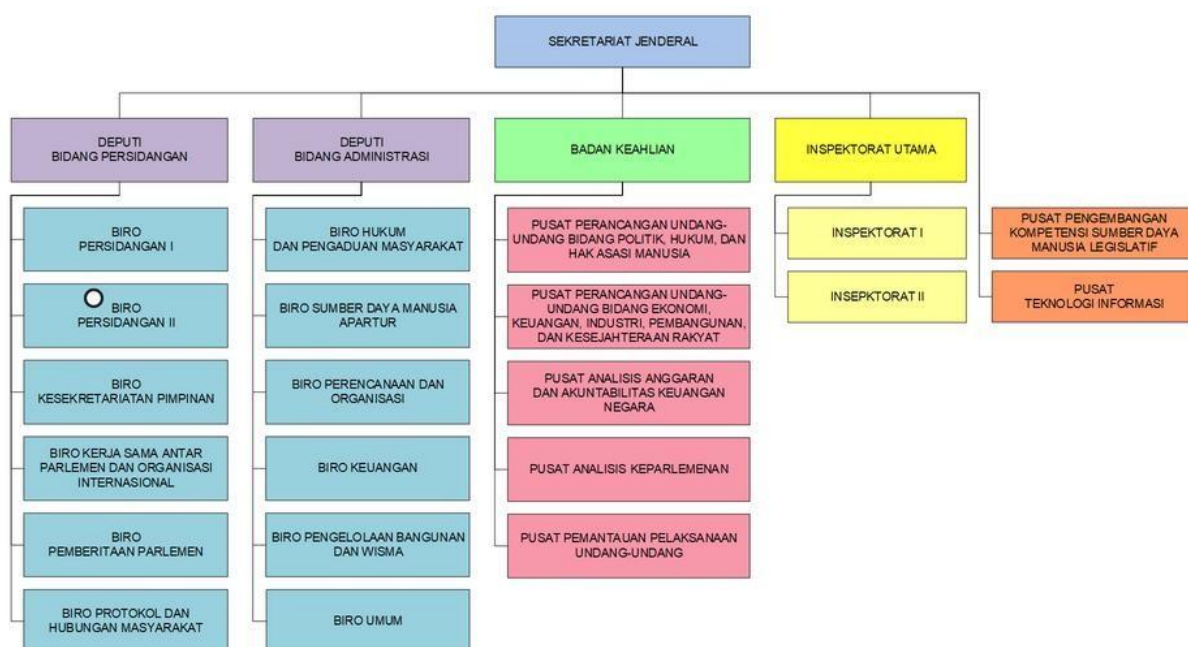
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Badan Keahlian dibantu oleh lima biro, yaitu Biro Persidangan I, Biro Persidangan II, Biro Kesekretariatan Pimpinan, Biro Kerja Sama Antar Parlemen dan Organisasi Internasional, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Biro Protokol dan Hubungan Masyarakat. Biro Persidangan II mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan persidangan kepada badan, mahkamah, dan panitia Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Biro Persidangan II menyelenggarakan fungsi:

1. Menyusun dan mengevaluasi rencana, program, serta anggaran di lingkungan Biro Persidangan II;

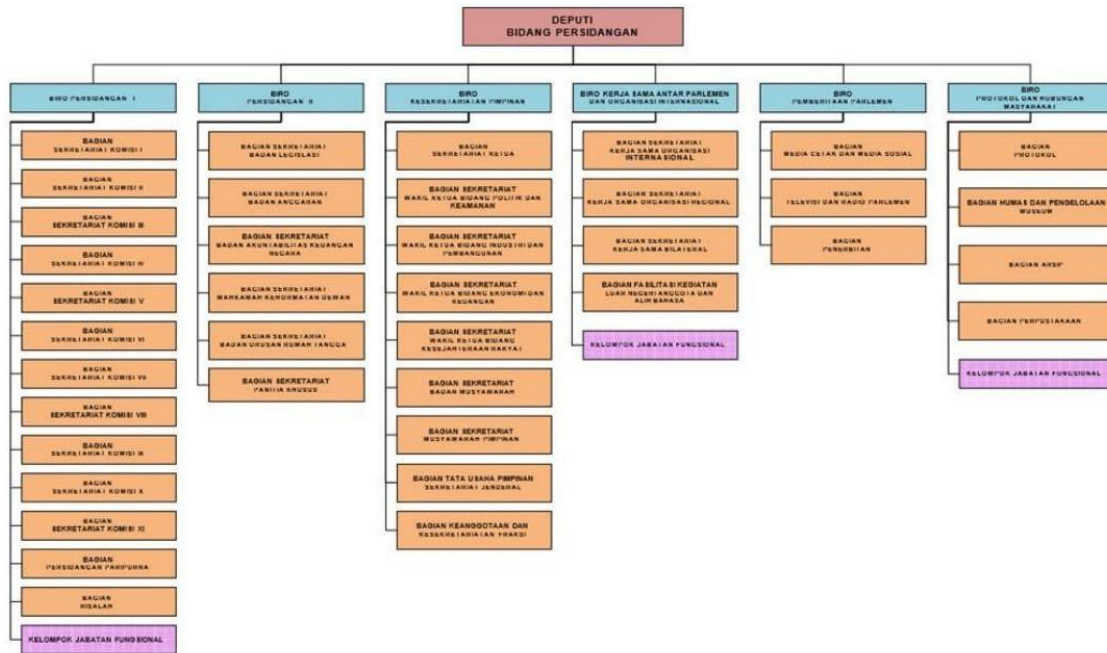
2. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang dukungan persidangan;
3. Melaksanakan rapat di badan, mahkamah, dan panitia Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
4. Menyelenggarakan administrasi persidangan di badan, mahkamah, dan panitia Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
5. Menyusun laporan kinerja Biro Persidangan II; dan
6. Melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Deputy Bidang Persidangan.

B. Struktur Organisasi

Berikut adalah struktur organisasi Sekretariat Jenderal DPR RI sebagai berikut:



Gambar II.1 Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal DPR RI



Gambar II.2 Struktur Organisasi Deputi Bidang Persidangan



Gambar II.3 Struktur Organisasi Biro Persidangan II

C. Tugas dan Fungsi Jabatan Peserta

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2024 tentang Jabatan Fungsional di Bidang Pengembangan Kapasitas dan Pembelajaran Aparatur Sipil Negara, Analisis Kebijakan adalah jabatan yang mempunyai tugas dan ruang lingkup kegiatan untuk melakukan kegiatan meliputi analisis dan advokasi kebijakan (Pasal 11). Adapun unsur kegiatan tugas jabatan analisis kebijakan sebagai berikut:

1. Menyediakan informasi terkait perumusan masalah kebijakan;
2. Merumuskan isue-isue kebijakan ke dalam rumusan masalah kebijakan;
3. Melaksanakan Pemantauan dan evaluasi implementasi kebijakan;
4. Penyusunan Naskah Akademik;

5. Menyediakan rekomendasi kebijakan;
6. Melakukan Fokus Group Diskusi kepada pejabat publik dan pemangku kepentingan terkait dengan isu, masalah dan atau kebijakan;
7. Melakukan uji publik rancangan rekomendasi kebijakan;
8. Melakukan kerjasama dan konsultasi dengan pejabat publik dan pemangku kepentingan;
9. Menyelenggarakan konsultasi, dialog dan diskusi dengan para pemangku kepentingan untuk memperoleh tanggapan terhadap usulan rancangan kebijakan;
10. Melakukan konsultasi, dialog dan diskusi dengan para pemangku kepentingan untuk memperoleh tanggapan terhadap kebijakan ;
11. Melakukan advokasi kebijakan;
12. Melakukan diseminasi kebijakan;
13. Menyampaikan gagasan kebijakan kepada pemangku kepentingan;
14. Hasil kajian yang dipublikasikan dalam bentuk monograf;
15. Hasil kajian yang dipublikasikan dalam bentuk buku referensi tingkat nasional;
16. Hasil kajian yang dipublikasikan dalam bentuk buku referensi tingkat internasional;
17. Hasil kajian yang dipublikasikan dalam bentuk artikel dalam jurnal ilmiah tidak terakreditasi;
18. Hasil kajian yang dipublikasikan dalam bentuk artikel dalam jurnal nasional terakreditasi;
19. Hasil kajian yang dipublikasikan dalam bentuk artikel dalam jurnal internasional;
20. Hasil kajian yang disajikan/dipresentasikan pada tingkat nasional;
21. Hasil kajian yang disajikan/dipresentasikan pada tingkat internasional;
22. Menulis artikel di media massa;
23. Melaksanakan tugas lain terkait yang diberikan oleh atasan;
24. Membuat konsep laporan kerja kepada atasan secara berkala dan setiap waktu diperlukan.

BAB III

PENETAPAN ISU PRIORITAS

A. Identifikasi Isu

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Analis Kebijakan di Biro Persidangan II, terdapat beberapa isu yang menghambat proses kerja. Isu-isu ini memerlukan analisis mendalam, kajian ilmiah, dan tindakan strategis untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi kualitas kerja Analis Kebijakan. Berikut ini adalah beberapa isu terkini yang terjadi di Biro Persidangan II yang membutuhkan perhatian dan penyelesaian.

A.1 Mekanisme Koordinasi Internal Antarbagian dalam Biro Persidangan II

Isu koordinasi internal antarbagian di Biro Persidangan II menjadi krusial mengingat beban kerja yang tinggi—membawahi 7 AKD, termasuk tambahan BAM sebagai AKD baru—sementara jumlah SDM hanya 6 orang (3 TSP, 2 PNS, 1 CPNS). Kondisi ini diperberat oleh dinamika AKD yang menuntut respons cepat dalam pengambilan keputusan dan penyelesaian administrasi, sehingga mekanisme koordinasi berjenjang sering terlewat dan berpotensi menimbulkan silo antarbagian karena koordinasi cenderung vertikal. Situasi ini selaras dengan tantangan yang diuraikan dalam Manajemen ASN, di mana profesionalisme birokrasi memerlukan tata kelola yang efektif, efisien, dan kolaboratif untuk mendukung pelayanan publik yang berkualitas. Dalam konteks SMART ASN, hal ini terkait erat dengan kompetensi literasi digital, budaya kerja kolaboratif, dan etika profesional agar komunikasi dan koordinasi dapat berjalan lintas bagian secara cepat dan akurat.

Kaitannya dengan Manajemen ASN, penyelesaian isu ini memerlukan penguatan fungsi peran ASN sebagai pelaksana kebijakan publik dan perekat persatuan, sekaligus implementasi Sistem Merit untuk memastikan penempatan SDM yang sesuai kompetensi, pelatihan berkelanjutan, dan pembinaan etika kerja. Dalam kerangka SMART ASN, penguatan *Digital Culture* menjadi kunci untuk membangun budaya kerja kolaboratif lintas bagian yang transparan dan adaptif. Integrasi prinsip sistem merit dan digital culture ini akan mendorong koordinasi internal yang sinergis, responsif, dan berorientasi pada hasil kerja optimal.

Isu mekanisme koordinasi internal di Biro Persidangan II berkaitan langsung dengan tugas analis kebijakan untuk menyediakan informasi terkait perumusan masalah kebijakan dan merumuskan isu-isu kebijakan ke dalam

kebijakan. Kedua tugas ini penting karena masalah yang muncul—seperti ketidakseimbangan beban kerja dan SDM, potensi silo akibat koordinasi vertikal, serta penambahan AKD baru yakni memerlukan data dan analisis yang akurat sebelum dicarikan solusi. Analisis kebijakan juga berperan dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi implementasi kebijakan, sehingga dapat mengukur sejauh mana mekanisme koordinasi yang ada mampu mengatasi hambatan dan mendukung kelancaran persidangan.

Isu mekanisme koordinasi internal di Biro Persidangan II berkaitan langsung dengan tugas analisis kebijakan untuk menyediakan informasi terkait perumusan masalah kebijakan dan merumuskan isu-isu kebijakan ke dalam rumusan masalah kebijakan. Kedua tugas ini penting karena masalah yang muncul seperti ketidakseimbangan beban kerja dan SDM, potensi silo akibat koordinasi vertikal, serta penambahan AKD baru yang memerlukan data dan analisis yang akurat sebelum dicarikan solusi. Analisis kebijakan juga berperan dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi implementasi kebijakan, sehingga dapat mengukur sejauh mana mekanisme koordinasi yang ada mampu mengatasi hambatan dan mendukung kelancaran persidangan.

B. Optimalisasi Transformasi Digital dalam Mendukung kinerja Biro Persidangan II

Isu optimalisasi transformasi digital di Biro Persidangan II muncul karena perkembangan teknologi informasi dan kecerdasan buatan (AI) yang semakin pesat menuntut perubahan cara kerja agar lebih efektif dan efisien. Saat ini, pemanfaatan teknologi di Biro Persidangan II masih terbatas pada dokumentasi dan publikasi, belum banyak menyentuh substansi utama pekerjaan seperti pengelolaan data legislasi, analisis kebijakan, atau dukungan pengambilan keputusan. Keterbatasan jumlah dan kompetensi SDM di unit kerja juga menjadi kendala dalam mengembangkan dan mengelola sistem berbasis IT dan AI secara optimal. Kondisi ini berbanding terbalik dengan tuntutan kebijakan nasional seperti Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang mengarahkan seluruh Lembaga negara untuk menerapkan sistem kerja berbasis teknologi secara menyeluruh.

Ruang lingkup isu ini mencakup pengembangan infrastruktur digital, peningkatan kapasitas SDM, dan penerapan teknologi untuk mendukung fungsi legislasi pengawasan, dan pelayanan publik DPR. Dalam Renstra DPR 2025–2029 yang mengusung konsep Parlemen Modern, digitalisasi menjadi salah satu fokus utama, termasuk di Biro Persidangan II. Beberapa inisiatif seperti SILEG (Sistem Informasi Legislasi),

Podcast Minum Sianida yang membahas isu DPR secara ringan, program magang DPR, dan layanan informasi AKD berbasis AI bernama MISS ROSIDA menunjukkan langkah awal yang positif. Namun, untuk mencapai transformasi digital yang optimal, diperlukan integrasi teknologi ke dalam proses kerja inti, sinergi antarbagian, serta pemanfaatan AI untuk analisis data, pemantauan, dan interaksi publik yang lebih efektif.

Kaitan isu optimalisasi transformasi digital di Biro Persidangan II dengan tugas analis kebijakan terletak pada peran strategis dalam mengidentifikasi, merumuskan, dan memberikan rekomendasi kebijakan berbasis data untuk mempercepat digitalisasi proses kerja inti. Analis kebijakan dapat menyediakan informasi terkait perumusan masalah kebijakan, merumuskan isu-isu menjadi rumusan masalah yang jelas, serta menyusun rekomendasi kebijakan yang mendukung integrasi teknologi ke dalam fungsi legislasi, pengawasan, dan pelayanan publik DPR. Pemantauan dan evaluasi implementasi kebijakan digitalisasi juga menjadi bagian penting, termasuk mengukur efektivitas inisiatif seperti SILEG, MISS ROSIDA, dan program publikasi kreatif seperti Podcast Minum Sianida dalam meningkatkan kinerja dan transparansi Biro.

Selain itu, analis kebijakan berperan dalam melakukan konsultasi, dialog, dan diskusi dengan pejabat publik dan pemangku kepentingan untuk memastikan strategi transformasi digital sesuai dengan kebutuhan pengguna dan arah kebijakan nasional. Proses ini dapat dilengkapi dengan fokus grup diskusi untuk menguji rancangan kebijakan, advokasi kebijakan digital, serta diseminasi hasil kajian agar implementasinya mendapat dukungan luas. Dengan begitu, transformasi digital di Biro Persidangan II tidak hanya menjadi proyek teknologi, tetapi juga bagian dari pembaruan sistem kerja yang berbasis bukti dan partisipasi, selaras dengan visi Parlemen Modern dalam Renstra DPR 2025–2029.

C. Tingkat Partisipasi Dan Representasi Substansial Masyarakat dalam Proses Legislasi

Tingkat partisipasi dan representasi substansial masyarakat dalam proses legislasi menjadi isu strategis bagi Biro Persidangan II, mengingat persidangan merupakan *core business* DPR dengan indikator kinerja utama berupa Indeks Kepuasan Anggota DPR atas dukungan layanan persidangan. Meskipun anggota DPR menjadi *beneficiary* utama, kinerja Biro Persidangan II juga mencakup dukungan terhadap pengelolaan tindak lanjut aspirasi masyarakat dan penyebaran undang-undang. Sorotan publik dan putusan Mahkamah Konstitusi terkait prinsip *meaningful participation* seperti pada UU Cipta

Kerja, UU IKN, dan UU TNI menunjukkan adanya tuntutan peningkatan keterlibatan publik. Arah kebijakan RPJPN 2025–2045 (UU 59/2024) dan RPJMN 2025–2029 (Perpres 12/2025) menekankan terwujudnya demokrasi substansial, yang selaras dengan Renstra DPR 2025–2029. Biro Persidangan II telah menginisiasi praktik baik seperti SILEG (Sistem Informasi Legislasi), Podcast Minum Sianida untuk membahas isu DPR secara ringan, serta MISS ROSIDA yang memanfaatkan teknologi AI untuk penyebaran informasi kegiatan AKD. Kehadiran Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) sebagai AKD baru diharapkan memperkuat saluran partisipasi, termasuk rencana penempatan pengelola konten internet (PKI) di Set-Set AKD sebagai penguat fungsi komunikasi publik.

Tingkat partisipasi dan representasi substansial masyarakat dalam proses legislasi berkaitan erat dengan *Digital Skills* dalam SMART ASN dan Pengembangan Kompetensi ASN dalam Manajemen ASN. Pemanfaatan keterampilan digital ASN diperlukan untuk mengelola inovasi seperti SILEG, MISS ROSIDA, dan Podcast Minum Sianida sebagai sarana memperluas jangkauan partisipasi publik, menyebarkan informasi legislasi secara efektif, dan memfasilitasi komunikasi dua arah yang bermakna. Di sisi lain, pengembangan kompetensi ASN menjadi kunci untuk memperkuat peran BAM dan mendukung rencana penempatan pengelola konten internet di Set-Set AKD, sehingga pengelolaan aspirasi masyarakat dapat dilakukan secara profesional, terintegrasi, dan selaras dengan prinsip demokrasi substansial yang diamanatkan dalam kebijakan pembangunan politik nasional.

Berdasarkan isu tingkat partisipasi dan representasi substansial masyarakat dalam proses legislasi, tugas analisis kebijakan yang paling relevan adalah menyediakan informasi terkait perumusan masalah kebijakan, merumuskan isu-isu kebijakan ke dalam rumusan masalah kebijakan, menyediakan rekomendasi kebijakan, melakukan fokus group diskusi dengan pejabat publik dan pemangku kepentingan, menyelenggarakan konsultasi atau dialog untuk memperoleh tanggapan terhadap usulan kebijakan, serta melakukan advokasi dan diseminasi kebijakan. Tugas ini mencakup juga penyampaian gagasan kebijakan kepada pemangku kepentingan, sehingga setiap masukan publik dapat terakomodasi dalam proses legislasi. Keterkaitan tersebut terlihat karena analisis kebijakan berperan langsung dalam mengidentifikasi masalah partisipasi publik, merumuskan langkah perbaikan, dan memastikan masukan dari masyarakat diolah menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan undang-undang. Penjelasan singkat terkait ketiga isu di atas dan keterkaitannya dengan kedudukan dan peran ASN mendukung SMART governance, serta analisis dampaknya dapat dilihat pada Tabel III.1 di bawah ini.

Tabel III.1 Rekapitulasi Deskripsi Isu

No	Isu Aktual	Data Dukung	Analisis Dampak	Keterkaitan SMART & Manajemen ASN
1	Mekanisme koordinasi internal antarbagian dalam Biro Persidangan II. (1) Beban yang cukup banyak dalam Biro Persidangan II yang membawahi 7 AKD, namun SDM dalam lingkup Biro hanya 6 orang (3 TSP, 2 PNS, 1 CPNS). (2) Dinamika internal AKD membutuhkan kecepatan dalam pengambilan keputusan dan dalam mengurus administrasi sehingga koordinasi berjenjang terlewatkan. (3) Ancaman silo antar bagian karena mekanisme koordinasi bersifat vertikal; jarang bersifat kolaborasi secara horizontal.	(1) Tambahan BAM sebagai AKD baru: https://emedia.dpr.go.id/2024/10/24/daftar-pimpinan-badan-di-dpr-termasuk-bam-yang-siap-tampung-aspirasi-rakyat/ (2) Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar tegaskan pentingnya pengawalan ketat terhadap sinkronisasi pelaksanaan kegiatan kesetjanaan dan kedewanan. Terutama setelah ada rencana tambahan anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara atau BA-BUN. (https://www.youtube.com/watch?v=YPDXZITNrlg)	(1) Kinerja Biro Persidangan II terhambat: Beban kerja yang tinggi dengan SDM sangat terbatas berpotensi menyebabkan keterlambatan dukungan pada AKD, terutama setelah adanya penambahan BAM. (2) Menurunnya kecepatan respons terhadap dinamika politik di AKD: Koordinasi yang lambat membuat Biro tidak mampu memberikan layanan administrasi dan teknis yang cepat, sehingga menurunkan kredibilitas DPR dalam fungsi legislasi. (3) <i>Overwork</i> dan <i>burnout</i> pada pegawai: Beban kerja tidak seimbang dengan jumlah pegawai akan menimbulkan kelelahan, stres, dan menurunkan produktivitas, yang akhirnya berdampak sistemik pada performa organisasi.	SMART ASN: Digital Culture Karena berkaitan dengan budaya kerja kolaboratif lintas bagian) Manajemen ASN: Sistem Merit Karena berkaitan dengan penempatan SDM sesuai kompetensi dan beban kerja)

No	Isu Aktual	Data Dukung	Analisis Dampak	Keterkaitan SMART & Manajemen ASN
2	Tingkat partisipasi dan representasi substansial masyarakat dalam proses legislasi (1) Persidangan menjadi salah satu <i>core business</i> DPR sehingga walaupun Anggota DPR menjadi <i>beneficiary</i> utama bagi Biro Persidangan II (Indikator Perjanjian Kinerja: Indeks Kepuasan Anggota DPR atas Dukungan Layanan Persidangan), Biro Persidangan II juga berkaitan dengan peran masyarakat dalam proses legislasi (Indikator Perjanjian Kinerja: % Dukungan Capaian Hasil Pengelolaan Tindak Lanjut Aspirasi Masyarakat; % Dukungan Capaian Kegiatan Penyebarluasan Undang-Undang) (2) Sorotan publik dan MK soal prinsip meaningful participation dalam	(1) Beberapa sorotan Undang-Undang terkait prinsip <i>meaningful participation</i>: UU Ciptaker – Inkonstitusional Bersyarat (Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 91/PUU-XVIII/2020d); dan sorotan tentang partisipasi publik dalam beberapa undang-undang seperti UU IKN, UU TNI, dll) (2) Konsep demokrasi substansial dalam UU 59/2024 tentang RPJPN dan Jangka Menengah (Perpres 12/2025 tentang RPMN) sebagai salah satu pilar Pembangunan politik di mana DPR memiliki sumbangsih. (3) Digitalisasi berkaitan juga dengan Upaya mendorong Tingkat partisipasi dan representasi substansial masyarakat dalam proses legislasi -> beberapa praktik baik telah dilakukan Biro Persidangan II seperti SILEG (Sistem Informasi Legislasi), Podcast Minum Sianida yang menyorot beberapa permasalahan di DPR dengan gaya ringan/santai: seperti budaya titip absen (kepegawaian), kolaborasi	(1) Turunnya legitimasi produk legislasi DPR: Publik menilai proses legislasi tidak transparan dan tidak melibatkan partisipasi bermakna, sehingga menurunkan kepercayaan terhadap DPR. (2) Risiko pembatalan atau koreksi undang- undang oleh Mahkamah Konstitusi: Seperti pada UU Ciptaker, produk legislasi rawan digugat dan dinyatakan inkonstitusional bersyarat, yang menghambat kepastian hukum. (3) Kegagalan mendukung agenda demokrasi substansial dalam RPJPN/RPMN: DPR berpotensi tidak sejalan dengan arah kebijakan pembangunan politik nasional, sehingga citra dan kinerjanya menurun dalam konteks demokrasi jangka panjang.	SMART ASN – Nilai Utama: Digital Skills – karena berkaitan dengan keadaan ASN memiliki keterampilan digital untuk mengelola kanal partisipasi publik berbasis teknologi Manajemen ASN – Nilai Utama: Pengembangan Kompetensi ASN - Karena berkaitan dengan kompetensi ASN dalam komunikasi publik, pengelolaan konten digital, serta fasilitasi partisipasi bermakna,

No	Isu Aktual	Data Dukung	Analisis Dampak	Keterkaitan SMART & Manajemen ASN
	produk legislasi DPR (mis. UU Ciptaker, UU IKN, UU TNI), yang mana secara langsung berkaitan pula dengan Set. AKD di bawah koordinasi Rosid II. (3) Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang (UU 59/2024 tentang RPJPN) dan Jangka Menengah (Perpres 12/2025 tentang RPMN) yang menekankan terwujudnya demokrasi substansial -> yang mana diturunkan pula dalam Renstra DPR 2025- 2029	biro dengan bagian, program magang di DPR (https://www.youtube.com/playlist?list=PLZhrKYKoXpnJaskusbNoxcdtbyrs4W6tX), dan informasi kegiatan AKD melalui teknologi AI dengan nama MISS ROSIDA (https://www.youtube.com/@djustiawanwidjaya/videos). (4) Fungsi Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) sebagai tambahan AKD Baru diharapkan memperkuat Tingkat partisipasi dan representasi substansial. Termasuk ke depan, penempatan pengelola konten internet (PKI) pada Set2 AKD.		

No	Isu Aktual	Data Dukung	Analisis Dampak	Keterkaitan SMART & Manajemen ASN
	Optimalisasi transformasi digital dalam mendukung kinerja Biro Persidangan II (1) Kemajuan TIK dan teknologi AI menuntut transformasi digital menjadi sebuah keharusan (2) Pemanfaatan teknologi informasi di Biro Persidangan II masih terbatas pada aspek dokumentasi dan publikasi, belum menyentuh substansi utama. (3) Terbatasnya SDM (kuantitas dan kualitas) unit kerja dalam mengelola pemanfaatan IT dan AI dalam proses pekerjaan di unit kerja.	(1) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagai landasan kebijakan (2) Renstra DPR 2025-2029: Parlemen Modern. Rencana Strategis (Renstra) DPR RI 2025–2029, disebutkan bahwa modernisasi DPR harus mencakup digitalisasi sistem kerja pendukung parlemen, terutama dalam mendukung fungsi legislasi dan pengawasan. Beberapa praktik baik telah dilakukan Biro Persidangan II seperti SILEG (Sistem Informasi Legislasi), Podcast Minum Sianida yang menyorot beberapa permasalahan di DPR dengan gaya ringan/santai: seperti budaya titip absen (kepegawaian), kolaborasi biro dengan bagian, program magang di DPR (https://www.youtube.com/playlist?list=PLZhrKYKoXpnJaskusbNoxcdtbyrs4W6tX), dan informasi kegiatan AKD melalui teknologi AI dengan nama MISS ROSIDA (https://www.youtube.com/@djustiawanwidjaya/videos)	(1) Kinerja Biro tetap manual dan tidak efisien: Proses dukungan legislasi dan persidangan akan lambat serta tidak responsif terhadap dinamika politik. (2) Rendahnya kualitas fungsi legislasi dan pengawasan DPR: Karena digitalisasi hanya sebatas dokumentasi/publikasi, bukan pada substansi analisis dan pengolahan data. (3) Kesenjangan dengan arah kebijakan nasional (SPBE & Parlemen Modern): DPR berpotensi tertinggal dari target modernisasi tata kelola pemerintahan berbasis digital.	SMART ASN – Nilai Utama: Digital Literacy – Karena berkaitan dengan kemampuan ASN dalam memahami, mengoperasikan, dan mengembangkan aplikasi serta sistem berbasis AI untuk mendukung fungsi legislasi dan pengawasan. Manajemen ASN – Nilai Utama: Sistem Informasi ASN – Karena berkaitan dengan pengelolaan sistem informasi yang terintegrasi untuk memantau, mengatur, dan memastikan SDM memiliki kompetensi sesuai kebutuhan transformasi digital.

B. Penetapan Isu Prioritas

Dari ketiga isu yang telah diusulkan, penulis kemudian menetapkan prioritas isu yang akan dianalisis lebih lanjut. Proses penetapan prioritas ini melibatkan evaluasi terhadap dampak potensial masing-masing isu, yang harapannya dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kinerja Analis Kebijakan.

B.1 Teknik Tapisan Isu

Teknik Dalam upaya perbaikan tata kelola dan peningkatan kinerja kelembagaan, penting untuk mengidentifikasi isu-isu strategis yang aktual, berdampak besar, serta memungkinkan untuk diintervensi secara tepat. Teknik AKPL (Aktual, Khalayak, Problematic, Layak) digunakan sebagai alat bantu dalam memilih isu berdasarkan urgensi dan relevansinya. Sifat teknik ini kualitatif–normatif, dengan logika berupa filter kualitatif yang memastikan hanya isu yang memenuhi keempat kriteria pokok yang dapat diangkat sebagai prioritas. Kriteria tersebut meliputi: Aktual (A), yakni isu masih hangat, relevan, dan belum selesai; Khalayak (K), yaitu isu menyangkut kepentingan masyarakat luas, bukan hanya segelintir pihak; Problematic (P), yakni adanya penyimpangan atau masalah nyata dari standar maupun aturan yang berlaku; serta Layak (L), yaitu isu yang logis, realistis, pantas, dan sesuai dengan kewenangan lembaga untuk dibahas. Dengan karakteristik ini, AKPL sangat sesuai digunakan di lingkungan Biro Persidangan II DPR RI, di mana terdapat sejumlah isu penting yang memengaruhi efektivitas pelayanan persidangan dan dukungan terhadap fungsi legislasi. Penilaian berikut disusun guna menentukan prioritas intervensi terhadap tiga isu utama yang telah teridentifikasi.

Kriteria	Penjelasan
A (Aktual)	Isu benar-benar terjadi dan sedang hangat dalam praktik kelembagaan Biro Persidangan II.
P (Problematic)	Isu memiliki dimensi kompleks yang memerlukan solusi mendesak.
(Kekhalayakan)	Isu menyangkut kepentingan banyak pihak, baik internal DPR maupun masyarakat umum.
L (Kelayakan)	Isu dapat dipecahkan dengan langkah kebijakan dan teknis yang masuk akal dan realistis.

Tabel III.2. Kriteria Penilaian dan Skoring

Isu mekanisme koordinasi internal antarbagian dalam Biro Persidangan II dinilai aktual karena muncul seiring beban kerja tinggi dengan hanya enam pegawai yang harus

menangani tujuh AKD serta tambahan BAM. Kompleksitas situasi ini sering menimbulkan keterlambatan koordinasi dan berpotensi melahirkan silo antarbagian, sehingga jelas problematik. Namun, isu ini hanya memiliki dampak khalayak yang terbatas karena lebih menyangkut efisiensi kerja internal biro ketimbang kepentingan publik secara langsung. Meski demikian, isu ini tetap layak diangkat karena solusinya realistis melalui penguatan budaya kolaboratif, penerapan sistem merit dalam penempatan SDM, serta pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung koordinasi.

Kriteria	Pertanyaan Tapis	Jawaban
Aktual	Apakah isu ini masih hangat, relevan, dan belum terselesaikan?	YA (sedang terjadi karena beban kerja tinggi, SDM terbatas, 7 AKD + tambahan BAM)
Khalayak	Apakah isu menyangkut kepentingan orang banyak?	TIDAK sepenuhnya (lebih berdampak pada kelancaran kerja internal biro, dampak ke publik ada tapi tidak langsung)
Problematic	Apakah isu mengandung masalah nyata/penyimpangan dari harapan?	YA (koordinasi sering terlewat, muncul silo antarbagian)
Layak	Apakah isu realistis, pantas, logis, sesuai kewenangan DPR?	YA (bisa diatasi dengan penguatan budaya kerja kolaboratif, sistem merit, teknologi kolaborasi digital)

Tabel III.3. AKPL Isu Pertama: Mekanisme Koordinasi Internal Antarbagian

Isu optimalisasi transformasi digital dinilai sangat aktual karena perkembangan TIK dan AI telah menjadi tuntutan global dan nasional, sejalan dengan Perpres 95/2018 tentang SPBE serta Renstra DPR 2025–2029 yang mengusung konsep Parlemen Modern. Permasalahan yang muncul adalah pemanfaatan teknologi di Biro Persidangan II masih terbatas pada dokumentasi dan publikasi, belum menyentuh substansi legislasi, ditambah keterbatasan SDM di bidang IT dan AI, sehingga bersifat problematik. Dampaknya menyentuh khalayak lebih luas karena berhubungan dengan efektivitas fungsi legislasi dan pengawasan DPR yang sangat penting bagi masyarakat.

Kriteria	Pertanyaan Tapis	Jawaban
Aktual	Apakah isu ini masih hangat, relevan, dan belum terselesaikan?	YA (global & nasional menuntut digitalisasi sesuai SPBE & Renstra DPR 2025–2029)
Khalayak	Apakah isu menyangkut kepentingan orang banyak?	YA (meski awalnya internal, dampaknya luas: kualitas legislasi & pengawasan DPR untuk publik)
Problematic	Apakah isu mengandung masalah nyata/penyimpangan dari harapan?	YA (pemanfaatan IT baru sebatas dokumentasi/publikasi, SDM terbatas)
Layak	Apakah isu realistis, pantas, logis, sesuai kewenangan DPR?	YA (sangat mungkin dilakukan)

Tabel III.4. AKPL Isu Kedua: Optimalisasi Transformasi Digital

Isu ketiga yakni partisipasi publik dalam proses legislasi dinilai sangat aktual karena menjadi sorotan publik, media, hingga Mahkamah Konstitusi terkait UU Cipta Kerja, UU IKN, dan UU TNI. Isu ini jelas problematik karena partisipasi masyarakat selama ini cenderung formalitas, tidak substantif, sehingga menimbulkan kritik terhadap legitimasi proses legislasi DPR. Dampaknya menyangkut khalayak secara luas karena berhubungan dengan kualitas demokrasi substantif, hak masyarakat untuk berpartisipasi, dan legitimasi parlemen di mata rakyat. Dengan demikian, isu ini sangat layak diangkat karena dapat ditangani melalui penguatan kompetensi ASN dalam komunikasi publik, optimalisasi kanal digital partisipatif seperti SILEG, MISS ROSIDA, hingga pemanfaatan BAM sebagai ruang representasi masyarakat yang lebih inklusif dan terintegrasi.

Kriteria	Pertanyaan Tapis	Jawaban
Aktual	Apakah isu ini masih hangat, relevan, dan belum terselesaikan?	YA (masih menjadi sorotan publik & MK, terutama UU Cipta Kerja, UU IKN, UU TNI)
Khalayak	Apakah isu menyangkut kepentingan orang banyak?	YA (sangat luas, menyangkut kualitas demokrasi substantif & legitimasi DPR)
Problematic	Apakah isu mengandung masalah nyata/penyimpangan dari harapan?	YA (partisipasi publik belum meaningful, sering formil, menimbulkan kritik tajam)
Layak	Apakah isu realistis, pantas, logis, sesuai kewenangan DPR?	YA (solusi ada: penguatan kompetensi ASN komunikasi publik, optimalisasi kanal digital SILEG, MISS ROSIDA, BAM, dll)

Tabel III.5. AKPL Isu Ketiga: Partisipasi Publik

Karena terdapat dua hal yang memiliki AKPL tinggi, maka dilakukan skoring terhadap tiga isu di atas sehingga dihasilkan isu utama. Pertama, Isu 1 – Mekanisme Koordinasi Internal antarbagian dalam Biro Persidangan II (Skor 16, Prioritas III). Isu koordinasi internal dinilai sangat aktual (5) karena muncul akibat beban kerja tinggi dengan hanya enam pegawai yang harus menangani tujuh AKD serta tambahan BAM. Dari segi problematik (4), kondisi ini menimbulkan keterlambatan koordinasi dan risiko silo antarbagian, meski skalanya masih bisa ditangani dengan solusi manajerial. Namun, dari segi khalayak (3), isu ini berdampak lebih banyak pada kelancaran kerja internal ketimbang publik luas, sehingga pengaruhnya terhadap masyarakat bersifat tidak langsung. Dari sisi layak (4), isu ini tetap realistis ditangani melalui penguatan budaya kolaboratif, penataan SDM berbasis sistem merit, serta pemanfaatan teknologi digital sederhana. Total skor 16, sehingga ditempatkan pada prioritas ketiga.

Kedua, Isu 2 – Optimalisasi Transformasi Digital dalam Mendukung Kinerja Biro

Persidangan II (Skor 20, Prioritas I). Transformasi digital mendapat skor tertinggi karena merupakan isu yang paling strategis. Isu ini sangat aktual (5) sesuai dengan SPBE dan Renstra DPR 2025–2029 yang mendorong parlemen modern. Dari sisi problematik (5), pemanfaatan teknologi masih sebatas dokumentasi dan publikasi, sementara substansi legislasi belum tersentuh digitalisasi, diperparah dengan keterbatasan SDM. Isu ini juga menyentuh khalayak (5) karena dampaknya langsung terhadap kualitas legislasi dan pengawasan DPR yang menjadi kepentingan publik luas. Dari aspek layak (5), penerapan literasi digital, sistem informasi legislasi, hingga integrasi AI sangat realistis dan sesuai kewenangan DPR. Total skor 20, sehingga ditetapkan sebagai prioritas pertama.

Ketiga, Isu 3 – Tingkat Partisipasi dan Representasi Substansial Masyarakat dalam Proses Legislasi (Skor 18, Prioritas II). Partisipasi publik dinilai sangat aktual karena terus menjadi sorotan publik, media, hingga Mahkamah Konstitusi. Dari sisi problematik (5), partisipasi publik masih sering bersifat formalitas, sehingga menimbulkan kritik tajam terhadap legitimasi legislasi DPR. Dampaknya pada khalayak (4) sangat besar karena menyangkut kualitas demokrasi substantif, meskipun implementasi partisipasi substantif menghadapi tantangan kapasitas dan kanal yang efektif. Dari sisi layak (4), solusi berupa penguatan kompetensi ASN komunikasi publik, optimalisasi kanal digital (SILEG, MISS ROSIDA, BAM) memungkinkan untuk dijalankan, meski memerlukan investasi dan perubahan kultur birokrasi. Total skor 18, sehingga masuk sebagai prioritas kedua.

ISU	A	P	K	L	JUMLAH	PRIORITAS
Mekanisme koordinasi internal antarbagian	5	4	3	4	16	III
Optimalisasi transformasi digital mendukung kinerja	5	5	5	5	20	I
Partisipasi dan representasi substansial masyarakat	5	5	4	4	18	II

Tabel III.6. Skoring Tiga Isu Berdasarkan Teknik AKPL

B.2 Pemilihan Isu Prioritas

Adapun rumusan isu utama terpilih adalah: **Belum teroptimalisasinya transformasi digital dalam mendukung kinerja di Biro Persidangan II Sekretariat Jenderal DPR RI pada tahun 2025** karena pemanfaatan teknologi digital terbatas pada penyediaan informasi satu arah serta terbatasnya sumber daya manusia dalam bidang TIK dan AI. Adapun rincian fokus, lokus, dan waktu pada rumusan isu masalah sebagai berikut:

1. Fokus → Transformasi digital dalam mendukung kinerja Rosid II
2. Lokus → Biro Persidangan II Sekretariat Jenderal DPR RI
3. Waktu → Tahun 2025

C. Analisis Isu

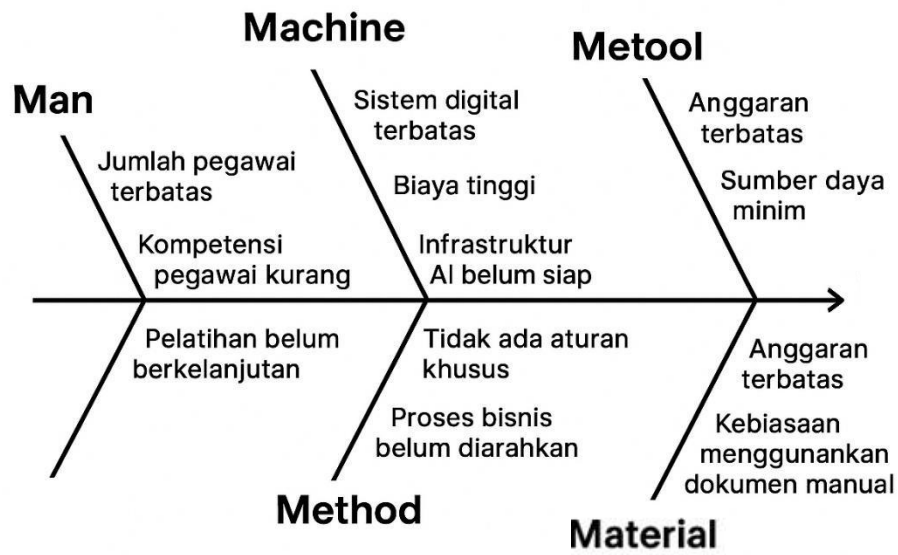
Metode *Fishbone Diagram* atau yang juga dikenal dengan Ishikawa Diagram adalah cara untuk mengurai penyebab sebuah masalah secara terstruktur. Dalam konteks isu transformasi digital di Biro Persidangan II DPR RI, pendekatan ini membantu melihat persoalan dari berbagai sisi. Dengan kerangka 4M yang terdiri dari *Man*, *Machine*, *Method*, dan *Material* penyebab isu dapat dijelaskan secara lebih rinci sebagai berikut:

Dari aspek *Man* (SDM/Manusia), jumlah pegawai jelas terbatas dibandingkan beban kerja yang ada. Biro Persidangan II harus melayani tujuh alat kelengkapan dewan, tetapi tenaga yang tersedia tidak sebanding. Kompetensi pegawai juga masih kurang, terutama dalam bidang kecerdasan buatan (AI) yang seharusnya bisa mendukung kerja legislasi. Pelatihan yang diberikan juga belum berkelanjutan. Akibatnya, kemampuan pegawai untuk menguasai teknologi baru berjalan lambat. Pada aspek *Machine* (Teknologi/Alat), keterbatasan terlihat nyata. Sistem digital yang dipakai, seperti Google VEO, masih terbatas dan membutuhkan biaya tinggi. Infrastruktur AI di internal DPR sendiri belum siap. Pemanfaatan teknologi pun masih sebatas satu arah. Artinya, teknologi hanya dipakai untuk menyampaikan informasi, bukan membangun komunikasi dua arah yang interaktif dengan publik. Padahal, komunikasi dua arah bisa memperkuat fungsi legislasi yang transparan dan partisipatif.

Dari aspek *Method* (Metode/Prosedur), kekurangan juga tampak jelas. Tidak ada aturan, baik eksternal maupun internal, yang secara spesifik mengatur digitalisasi kerja legislasi melalui penggunaan AI. Proses bisnis yang ada belum diarahkan untuk mendukung transformasi digital secara penuh. Koordinasi antarbagian dan unit kerja dalam penggunaan AI juga masih bersifat personal. Artinya, kerja sama belum dilakukan secara menyeluruh, melainkan hanya terbatas pada individu atau bagian tertentu saja. Kondisi ini membuat upaya digitalisasi berjalan tidak terintegrasi. Sementara itu, dari aspek *Material* (Sumber Daya/Anggaran/Regulasi), masalah anggaran menjadi hambatan utama. Dana yang tersedia untuk mengembangkan aplikasi maupun memperkuat infrastruktur digital masih kecil. Alokasi sumber daya untuk inovasi digitalisasi juga minim. Akibatnya, langkah-langkah pengembangan sering tertunda atau tidak maksimal. Selain itu, kebiasaan lama masih melekat. Pegawai masih sangat bergantung pada

dokumen manual berbasis kertas. Kebiasaan ini memperlambat adaptasi terhadap teknologi digital yang seharusnya bisa mempercepat pekerjaan.

TANTANGAN TRANSFORMASI DIGITAL BIRO PERSIDANGAN II DPR RI



Gambar III.1. Analisis Isu Berdasarkan Metode *Fishbone Diagram*

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penyebab belum optimalnya transformasi digital di Biro Persidangan II datang dari banyak sisi. Masalah SDM, keterbatasan teknologi, ketiadaan aturan dan prosedur, serta hambatan anggaran dan budaya kerja lama, semuanya saling terkait. Analisis dengan metode Fishbone 4M menunjukkan bahwa isu ini tidak bisa diselesaikan dengan satu langkah, tetapi memerlukan pendekatan yang menyentuh keempat faktor penyebab sekaligus.

D. Gagasan Pemecahan Isu

Transformasi digital di Biro Persidangan II Sekretariat Jenderal DPR RI dapat dipandang melalui kerangka POAC (*Planning, Organizing, Actuating, Controlling*). Kerangka ini penting karena isu yang muncul saling terkait: keterbatasan SDM dan kompetensi di bidang teknologi, keterbatasan sistem aplikasi yang hanya bersifat satu arah, serta kurangnya koordinasi internal antarbagian. Ketiga isu tersebut berkelindan sehingga menimbulkan hambatan dalam mendukung fungsi utama persidangan yang menjadi *core business* lembaga legislatif. Oleh karena itu, gagasan yang ditawarkan adalah mengembangkan transformasi digital yang bersifat konten interaktif dua arah (*two-way communication*) berbasis teknologi kecerdasan buatan, dengan didukung kapasitas SDM yang memadai, sistem aplikasi yang terintegrasi, dan mekanisme koordinasi internal yang adaptif. Penyelesaian utama diarahkan pada terciptanya sistem digital yang tidak hanya menyajikan informasi, tetapi juga mengelola, menganalisis, dan merespons kebutuhan persidangan secara dinamis.

Perencanaan (*planning*) dilakukan dengan menyusun timeline kerja yang rinci serta rencana tindak lanjut pelaksanaan aktualisasi Pelatihan Dasar. Perencanaan ini memastikan setiap tahap kegiatan berjalan sesuai target waktu yang telah ditentukan. Selain itu, dilakukan benchmarking penggunaan teknologi kecerdasan buatan (AI) di unit kerja lain dalam lingkup Setjen DPR RI untuk mendapatkan gambaran praktik terbaik yang dapat diadaptasi di Biro Persidangan II. Benchmarking ini menjadi landasan dalam merancang strategi optimalisasi MISS ROSIDA agar lebih interaktif.

Pengorganisasian (*organizing*) dilaksanakan dengan keterlibatan langsung dalam tim digital Biro Persidangan II yang bertugas mengelola konten MISS ROSIDA. Koordinasi juga dilakukan bersama mentor dan *coach* guna menyelaraskan perencanaan, implementasi, hingga evaluasi kebijakan. Selain itu, proses penghimpunan data dukung dijalankan dengan melibatkan staf di lingkup Rosid II maupun pihak lain yang relevan, menggunakan berbagai metodologi seperti diskusi kelompok maupun survei. Upaya ini memastikan ketersediaan informasi yang komprehensif dan valid untuk mendukung pelaksanaan program.

Pelaksanaan (*actuating*) aktualisasi dimulai dengan mengimplementasikan penayangan QR Code dalam setiap video MISS ROSIDA. QR Code ini berfungsi

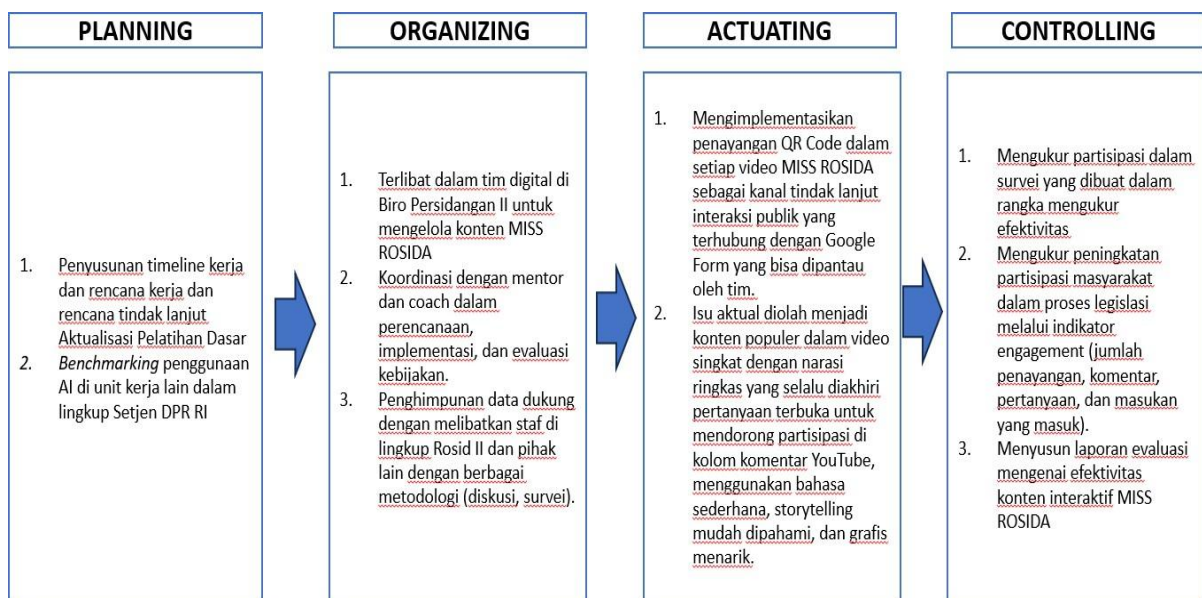
sebagai kanal interaktif untuk menampung masukan dan pertanyaan dari publik melalui Google Form yang dapat dipantau oleh tim. Selanjutnya, setiap video yang diproduksi disusun dengan narasi singkat yang diakhiri dengan pertanyaan terbuka sehingga mendorong audiens untuk berpartisipasi melalui kolom komentar di YouTube. Konten yang diangkat berupa isu-isu aktual yang diolah dengan bahasa sederhana, diperkaya dengan grafis menarik, serta menggunakan storytelling agar mudah dipahami masyarakat luas.

Pengendalian (*controlling*) dilakukan dengan mengukur tingkat partisipasi publik terhadap survei yang disediakan sebagai sarana evaluasi efektivitas konten. Selain itu, peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses legislasi diukur melalui indikator keterlibatan, seperti jumlah penayangan, komentar, pertanyaan, dan masukan yang masuk melalui kanal interaktif. Seluruh data hasil pengukuran ini dianalisis untuk kemudian dituangkan dalam laporan evaluasi efektivitas konten interaktif MISS ROSIDA. Laporan ini menjadi acuan untuk perbaikan berkelanjutan dalam optimalisasi transformasi digital di Biro Persidangan II.

Isu	Gagasan Penyelesaian	Gagasan Penyelesaian Utama
Pemanfaatan teknologi AI MISS ROSIDA di Biro Persidangan II sebatas <i>broadcast tool</i> yang masih satu arah. Teknologi hanya dipakai untuk menyampaikan informasi, bukan membangun komunikasi dua arah yang interaktif dengan publik.	Penambahan Fitur Interaktif 1. Menyediakan <i>QR Code</i> yang tersaji dalam tayangan sebagai kanal interaktif untuk menerima masukan/pertanyaan yang terhubung dengan Google Form	Optimalisasi Tranformasi Digital Biro Persidangan II DPR RI melalui Perancangan Konten Interaktif MISS ROSIDA
	Konten Video Sebagai Pemicu Diskusi 1. Penyusunan narasi video yang diakhiri dengan pertanyaan- pertanyaan terbuka sehingga mendorong diskusi di kolom komentar YouTube.	
	Jejaring Aspirasi 1. Mengukur partisipasi dalam survei yang dibuat dalam rangka mengukur efektivitas MISS ROSIDA Pembahasan Isu Aktual sebagai Narasi Konten	

Isu	Gagasan Penyelesaian	Gagasan Penyelesaian Utama
	1. <i>Highlight</i> isu aktual setiap AKD dalam lingkup ROSID II dengan pola pembahasan isu aktual/urgensi di masyarakat, serta atensi dari AKD di lingkup ROSID II	Optimalisasi Tranformasi Digital Biro Persidangan II DPR RI melalui Perancangan Konten Interaktif MISS ROSIDA

Tabel III.7. Keterkaitan Isu dengan Gagasan Penyelesaian Isu



Tabel III. 8. Analisis Tahapan Gagasan Kreatif Berdasarkan Metode POAC

BAB IV

RANCANGAN AKTUALISASI

A. Tabel IV.1 Matriks Rancangan Aktualisasi Pelatihan Dasar CPNS

Matriks Rancangan Aktualisasi Unit Kerja	:	Biro Persidangan II
Identifikasi Isu	:	1. Mekanisme koordinasi internal antarbagian dalam Biro Persidangan II 2. Tingkat partisipasi dan representasi substansial masyarakat dalam proses legislasi 3. Optimalisasi transformasi digital dalam mendukung kinerja Biro Persidangan II
Isu yang Diangkat	:	Optimalisasi transformasi digital dalam mendukung kinerja Biro Persidangan II
Gagasan Pemecahan Isu	:	Optimalisasi Tranformasi Digital Biro Persidangan II DPR RI Melalui Perancangan Konten Interaktif MISS ROSIDA

No	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output/Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan Agenda II – Nilai-nilai Dasar ASN BerAKHLAK	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan Agenda III – Manajemen ASN dan SMART ASN	Kontribusi Terhadap Visi/Misi/Tusi/Tujuan Organisasi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	PLANNING (Perencanaan) Menyusun rencana kerja dan strategi tindak lanjut berbasis transformasi digital untuk perancangan konten interaktif MISS ROSIDA	Penyusunan <i>timeline</i> kerja dan rencana kerja serta rencana tindak lanjut Aktualisasi Pelatihan Dasar - Perancangan Konten Interaktif MISS ROSIDA	Dokumen timeline dan rencana kerja aktualisasi	Akuntabel Menyusun <i>timeline</i> menunjukkan pertanggungjawaban atas target yang jelas dan terukur.	MASN Sistem Merit Rencana kerja berbasis target jelas menunjukkan penerapan sistem merit ASN. Smart ASN Digital Skill Keterampilan digital dipakai untuk menyusun timeline dan rencana kerja yang terukur.	Memperkuat budaya kerja yang terukur dan akuntabel melalui perencanaan kinerja berbasis target jelas, sehingga mendukung terciptanya tata kelola persidangan yang lebih modern dan profesional.
		<i>Benchmarking</i> dalam bentuk observasi singkat dan studi dokumen terkait pemanfaatan AI di unit	Catatan hasil observasi dan ringkasan studi dokumen	Kompeten Melakukan observasi dan studi literatur untuk meningkatkan	MASN Pengembangan kompetensi ASN Observasi praktik AI memperkuat kompetensi	Peningkatan kapasitas inovasi digital dalam mendukung persidangan, sekaligus menjadi sarana

No	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output/Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan Agenda II – Nilai-nilai Dasar ASN BerAKHLAK	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan Agenda III – Manajemen ASN dan SMART ASN	Kontribusi Terhadap Visi/Misi/Tusi/Tujuan Organisasi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		kerja lain dalam lingkup Setjen DPR RI.	(notulensi/ <i>brief report</i>).	pengetahuan dan kualitas rencana.	profesional ASN. Smart ASN Digital Culture Mendorong budaya belajar dan adaptasi inovasi digital dari unit kerja lain.	belajar adaptif untuk menghasilkan layanan yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan organisasi.
2.	ORGANIZING (Pengorganisasian) Membangun tim kerja kolaboratif dengan koordinasi lintas pihak untuk mendukung perencanaan, implementasi, serta evaluasi kebijakan perancangan konten interaktif MISS ROSIDA	Terlibat dalam tim digital di Biro Persidangan II dalam pengelolaan konten MISS ROSIDA.	Bukti keterlibatan (notulensi rapat/dokumentasi kegiatan).	Kolaboratif Aktif bekerja sama dengan rekan tim dalam mendukung pengelolaan konten digital.	MASN Tata kelola organisasi ASN Partisipasi dalam tim digital mencerminkan peran ASN dalam kolaborasi organisasi Smart ASN Digital Culture Budaya kerja kolaboratif digital diperkuat melalui tim lintas pihak.	Memperkuat kolaborasi organisasi dan membangun sinergi lintas unit, yang penting bagi efektivitas dukungan persidangan berbasis teknologi.
		Koordinasi dengan mentor dan coach dalam perencanaan, implementasi, dan evaluasi kebijakan Perancangan Konten Interaktif MISS ROSIDA	Catatan hasil koordinasi/lembar konsultasi dengan mentor dan <i>coach</i> .	Loyal Menunjukkan kesetiaan pada arahan pimpinan dan pembimbing demi keselarasan kerja.	MASN Kode Etik & Kepatuhan ASN Menjalankan arahan mentor mencerminkan kepatuhan ASN pada kode etik profesi. Smart ASN Digital Ethics Menjaga etika komunikasi dalam koordinasi berbasis media digital.	Mendorong profesionalisme ASN melalui bimbingan dan penyalarsan kerja, sehingga tugas yang dijalankan tetap konsisten dengan standar etika dan tata kelola modern.
		Penghimpunan data dukung dengan melibatkan staf dan pihak lain menggunakan berbagai metodologi (diskusi, survei).	Hasil survei internal (rekap jawaban Google Form/lembar kuesioner) dan dokumentasi diskusi.	Harmonis Menghargai pendapat rekan kerja melalui dialog dan keterlibatan aktif.	MASN Transparansi dalam sistem merit Data dukung dikumpulkan terbuka sebagai dasar keputusan objektif. Smart ASN Digital Safety Menjamin keamanan data survei agar informasi publik tetap terlindungi	Mencerminkan keterbukaan organisasi terhadap masukan berbagai pihak, memperkuat dasar pengambilan keputusan berbasis data, serta melibatkan publik sebagai bagian dari peningkatan kualitas layanan.

No	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output/Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan Agenda II – Nilai-nilai Dasar ASN BerAKHLAK	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan Agenda III – Manajemen ASN dan SMART ASN	Kontribusi Terhadap Visi/Misi/Tusi/Tujuan Organisasi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
3.	ACTUATING (Pelaksanaan) Mengimplementasikan konten interaktif MISS ROSIDA dengan pendekatan partisipatif	Mengimplementasikan penayangan QR Code dalam video MISS ROSIDA sebagai kanal tindak lanjut interaksi publik melalui Google Form.	Video dengan QR Code aktif yang terhubung ke Google Form.	Adaptif Memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan interaksi publik.	MASN Inovasi layanan ASN Pemanfaatan QR Code menunjukkan peran ASN menghadirkan layanan yang lebih mudah diakses publik. Smart ASN Digital Skill Menggunakan keterampilan digital untuk meningkatkan interaksi publik.	Memperluas akses publik terhadap konten persidangan, meningkatkan transparansi, dan menjadi wujud modernisasi layanan berbasis teknologi digital.
		Menghasilkan narasi singkat yang selalu diakhiri pertanyaan terbuka untuk mendorong partisipasi di kolom komentar YouTube, dengan mengolah isu aktual AKD menjadi konten populer dengan bahasa sederhana yang mudah dipahami masyarakat.	Video dengan narasi singkat yang berakhir dengan pertanyaan terbuka serta menghadirkan konten populer bertema isu aktual AKD dengan storytelling sederhana. Video tersebut dipublikasikan di kanal YouTube	Kolaboratif Menjalankan pendekatan kolaboratif yang mengajak partisipasi masyarakat melalui pertanyaan terbuka di media digital sekaligus menyajikan informasi substantif dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami publik.	MASN Partisipasi publik ASN Konten interaktif menjadi sarana ASN membuka ruang keterlibatan masyarakat. Smart ASN Digital Culture Membiasakan budaya dialog publik melalui media digital.	Memperkuat komunikasi dua arah antara organisasi dan masyarakat serta memastikan substansi informasi mudah dipahami, sehingga meningkatkan partisipasi publik, literasi masyarakat, dan kepercayaan terhadap lembaga.

No	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output/Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan Agenda II – Nilai-nilai Dasar ASN BerAKHLAK	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan Agenda III – Manajemen ASN dan SMART ASN	Kontribusi Terhadap Visi/Misi/Tusi/Tujuan Organisasi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
4.	CONTROLLING (Pengendalian) Melakukan monitoring dan evaluasi efektivitas konten interaktif MISS ROSIDA	Mengukur partisipasi dalam survei untuk menilai efektivitas.	Rekapitulasi hasil survei (Google Form/Excel).	Akuntabel Evaluasi berbasis data (<i>evidence based</i>) untuk mengukur keberhasilan program secara objektif.	MASN Akuntabilitas ASN Hasil survei menjadi dasar pertanggungjawaban objektif kinerja ASN. Smart ASN Digital Safety Data partisipasi masyarakat dikelola secara aman dan etis.	Menjadi wujud akuntabilitas pelayanan publik, memastikan kinerja dapat dinilai secara objektif, dan memberikan dasar perbaikan yang nyata.
		Mengukur peningkatan partisipasi masyarakat melalui analisis <i>engagement</i> sederhana (jumlah penayangan, komentar, pertanyaan, dan masukan yang masuk).	Laporan analisis engagement (data <i>views, likes</i> , komentar, masukan publik).	Akuntabel Hasil pengukuran data partisipasi publik dipakai sebagai dasar pertanggungjawaban kinerja secara transparan dan objektif.	MASN Evidence-based policy ASN Analisis data publik mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti. Smart ASN Digital Skill Keterampilan digital dipakai untuk mengolah dan menganalisis data <i>engagement</i> .	Memperkuat transparansi, mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti, dan memastikan program organisasi tetap sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
		Menyusun laporan evaluasi efektivitas konten interaktif MISS ROSIDA.	Dokumen laporan evaluasi efektivitas beserta rekomendasi pengembangan dalam bentuk <i>policy brief</i> .	Akuntabel Memberikan laporan yang transparan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada organisasi.	MASN Transparansi ASN Laporan evaluasi merupakan bentuk keterbukaan ASN kepada organisasi Smart ASN Digital Culture Membiasakan budaya transparansi dan berbagi informasi melalui laporan digital.	Mendorong budaya akuntabilitas dan perbaikan berkelanjutan, sekaligus memastikan hasil kerja dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada organisasi maupun publik.

B. Tabel IV.2 Jadwal Rencana Kegiatan

No	Kegiatan/ Tahapan Kegiatan	AGUSTUS				SEPTEMBER				OKTOBER			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1.	Planning (Perencanaan)												
	a) Penyusunan <i>timeline</i> kerja dan rencana kerja serta rencana tindak lanjut Aktualisasi Pelatihan Dasar - Perancangan Konten Interaktif MISS ROSIDA												
	b) <i>Benchmarking</i> dalam bentuk observasi singkat dan studi dokumen terkait pemanfaatan AI di unit kerja lain dalam lingkup Setjen DPR RI.												
2.	Organizing (Pengorganisasian)												
	a) Terlibat dalam tim digital di Biro Persidangan II dalam pengelolaan konten MISS ROSIDA.												
	b) Koordinasi dengan mentor dan coach dalam perencanaan, implementasi, dan evaluasi kebijakan Perancangan Konten Interaktif MISS ROSIDA												
	c) Penghimpunan data dukung dengan melibatkan staf dan pihak lain menggunakan berbagai metodologi (diskusi, survei).												
3.	<i>Actuating</i> (Pelaksanaan):												
	a) Mengimplementasikan penayangan QR Code dalam video MISS ROSIDA sebagai kanal tindak lanjut interaksi publik melalui Google Form.												
	b) Menghasilkan narasi singkat yang selalu diakhiri pertanyaan terbuka untuk mendorong partisipasi di kolom komentar YouTube, dengan mengolah isu aktual AKD menjadi konten populer dengan bahasa sederhana yang mudah dipahami masyarakat.												
4	<i>Controlling</i> (Pengendalian):												

No	Kegiatan/ Tahapan Kegiatan	AGUSTUS				SEPTEMBER				OKTOBER			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
	a) Mengukur partisipasi dalam survei untuk menilai efektivitas.												
	b) Mengukur peningkatan partisipasi masyarakat melalui analisis <i>engagement</i> sederhana (jumlah penayangan, komentar, pertanyaan, dan masukan yang masuk).												
	c) Menyusun laporan evaluasi efektivitas konten interaktif MISS ROSIDA.												

Tabel IV.2. Jadwal Rencana Kegiatan

BAB V

PELAKSANAAN AKTUALISASI

A. Jadwal Pelaksanaan Aktualisasi

No	Kegiatan & Tahapan Kegiatan	AGUSTUS				SEPTEMBER				OKTOBER			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1.	<i>Planning</i> (Perencanaan)												
	a) Penyusunan <i>timeline</i> kerja dan rencana kerja serta rencana tindak lanjut Aktualisasi Pelatihan Dasar - Perancangan Konten Interaktif MISS ROSIDA												
	b) <i>Benchmarking</i> dalam bentuk observasi singkat dan studi dokumen terkait pemanfaatan AI di unit kerja lain dalam lingkup Setjen DPR RI.												
2.	<i>Organizing</i> (Pengorganisasian)												
	a) Terlibat dalam tim digital di Biro Persidangan II dalam pengelolaan konten MISS ROSIDA.												
	b) Koordinasi dengan mentor dan <i>coach</i> dalam perencanaan, implementasi, dan evaluasi kebijakan Perancangan Konten Interaktif MISS ROSIDA												
3.	<i>Controlling</i> (Pengendalian)												
	a) Mengukur partisipasi dalam survei untuk menilai efektivitas.												
	b) Mengukur peningkatan partisipasi masyarakat melalui analisis <i>engagement</i> sederhana (jumlah penayangan, komentar, pertanyaan, dan masukan yang masuk).												
4.	<i>Actuating</i> (Pelaksanaan):												
	a) Mengimplementasikan penayangan QR Code dalam video MISS ROSIDA sebagai kanal tindak lanjut interaksi												

No	Kegiatan & Tahapan Kegiatan	AGUSTUS				SEPTEMBER				OKTOBER			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
	publik melalui Google Form.												
	b) Menghasilkan narasi singkat yang selalu diakhiri pertanyaan terbuka untuk mendorong partisipasi di kolom komentar YouTube, dengan mengolah isu aktual AKD menjadi konten populer dengan bahasa sederhana yang mudah dipahami masyarakat.												
	c) Menyusun laporan Pelaksanaan Aktualisasi Optimalisasi Tranformasi Digital Biro Persidangan II DPR RI Melalui Perancangan Konten Interaktif MISS ROSIDA												

Tabel V.1. Jadwal Pelaksanaan Aktualisasi

Terdapat beberapa penyesuaian pelaksanaan apabila dibandingkan dengan tabel rencana kegiatan pada bab sebelumnya. Penyesuaian kegiatan utamanya terdapat pada bagian pengendalian (*controlling*). Pada rencana kegiatan, penulis mengasumsikan pengendalian merupakan fungsi terakhir dalam siklus manajemen sehingga ia diletakkan pada akhir tahapan. Pengendalian juga berfungsi untuk membandingkan hasil aktual dengan target serta memberikan umpan balik (*feedback*) ke input yang sudah diterapkan. Karena itu, semula disusun tiga sub-kegiatan meliputi: (1) Mengukur partisipasi dalam survei untuk menilai efektivitas; (2) Mengukur peningkatan partisipasi masyarakat melalui analisis *engagement* sederhana (jumlah penayangan, komentar, pertanyaan, dan masukan yang masuk); dan (3) Menyusun laporan evaluasi efektivitas konten interaktif MISS ROSIDA.

Namun, pada pelaksanaan aktualisasi, penulis menilai bahwa pengendalian tidak selalu berarti dilakukan hanya sekali di akhir, karena pengendalian juga berfungsi sebagai umpan balik (*feedback loop*) untuk memperbaiki perencanaan dan tindakan berikutnya. Dengan kata lain, pengendalian bersifat berkelanjutan dan siklikal di mana hasil pengendalian digunakan untuk memperbaiki rencana, sehingga siklus manajemen berjalan terus-menerus. Karena itu, tahapan pengendalian yang terdiri dari (1) Mengukur partisipasi dalam survei untuk menilai efektivitas; (2) dan Mengukur peningkatan

partisipasi masyarakat melalui analisis *engagement* sederhana (jumlah penayangan, komentar, pertanyaan, dan masukan yang masuk) dilakukan sebelum tahapan pelaksanaan (*actuating*) dengan alasan video Miss Rosida tidak diinsiasi sejak awal, melainkan sudah dilaksanakan dalam beberapa kali episode. Pengukuran partisipasi dalam survei dan pengukuran analisis *engagement* sederhana di sini dimaksudkan untuk mengukur sejauh mana penilaian publik terhadap video Miss Rosida yang sudah berlangsung, sehingga hasil analisis pada tahapan ini menjadi poin optimalisasi yang diterapkan pada tahap berikutnya (pelaksanaan/*actuating*).

B. Penjelasan Tahapan Kegiatan

1. Perencanaan (*Planning*)



Salah satu kegiatan perencanaan yang dilakukan adalah dengan melakukan analisis *benchmarking* terhadap berbagai unit kerja yang telah mengimplementasikan sistem berbasis AI. *Benchmarking* ini bertujuan untuk menggali praktik terbaik dalam rangka menerapkan transformasi digital, serta mengidentifikasi peluang pengembangan lanjutan guna mendukung peningkatan kinerja unit kerja. Penulis melakukan identifikasi penggunaan AI akan dikembangkan pula oleh Biro Hukum dengan *Artificial Intelligence for Recommendation and Analytics* (AIRA).

Sedangkan pada informasi isu substansif, penulis memilih untuk mendalami produk Isu Sepekan yang disusun oleh Pusat Analisis Keparlemenan sebagai pembanding dengan Miss Rosida yang memiliki tujuan yang sama, yakni menyajikan informasi aktual pada AKD terkait. Kegiatan perencanaan ini juga mencerminkan penerapan nilai BERAKHLAK, khususnya nilai Harmonis dan Kolaboratif. Nilai Harmonis tercermin dari upaya untuk membangun hubungan yang baik dan saling menghargai antarunit kerja melalui kegiatan *benchmarking* dan berbagi praktik terbaik. Sementara nilai Kolaboratif tampak dalam sinergi lintas unit kerja, seperti antara Biro Hukum dan Pusat Analisis Keparlemenan dalam mengembangkan inovasi berbasis kecerdasan buatan yang mendukung efektivitas kinerja organisasi secara keseluruhan. Selain itu, kegiatan ini juga sejalan dengan semangat

SMART ASN *Digital Culture*, yang menekankan pentingnya inovasi, kolaborasi, dan adaptasi terhadap teknologi digital dalam setiap proses kerja.

Adapun *lesson-learned* AIRA Biro Hukum terhadap Miss Rosida Biro Persidangan II antara lain: *Pertama*, Miss Rosida dapat mempublikasikan kegiatan AKD dan mengumpulkan umpan balik masyarakat melalui kolom komentar YouTube. Namun, penekanannya masih pada kemudahan akses dan partisipasi awal. Sedangkan AIRA secara eksplisit menggunakan AI untuk menganalisis data aspirasi dan pengaduan, serta menghasilkan *data trend* yang valid mengenai permasalahan yang paling banyak diadukan. Pembelajaran yang didapatkan adalah Miss Rosida dapat mengembangkan atau mengintegrasikan kemampuan AI untuk melakukan analisis yang lebih mendalam terhadap umpan balik yang terkumpul seperti analisis sentimen, identifikasi topik atau isu-isu yang paling sering muncul, dan pola-pola kepedulian penonton terkait kegiatan AKD.

Kedua, Miss Rosida menyebutkan penggunaan aplikasi pihak ketiga untuk menyusun informasi terkait setiap AKD dalam waktu maksimal 8 detik yang menunjukkan efisiensi dalam kompilasi data. Sedangkan AIRA secara spesifik menekankan percepatan dengan memangkas waktu analisis pengaduan masyarakat bagi kebutuhan Anggota dan Alat Kelengkapan Dewan. Efisiensi AIRA berpusat pada pengurangan waktu analisis yang kompleks. Karena itu, Miss Rosida dapat memanfaatkan AI untuk meringkas secara otomatis volume besar komentar atau masukan yang terkait dengan AKD masing-masing dan mengategorikan umpan balik secara efisien.



Gambar V.2 Produk Isu Sepekan Minggu ke-4 September 2025, Pusat Analisis Keparlemenan (2025)

Isu Sepekan yang disusun oleh Pusat Analisis Keparlemenan menunjukkan pola dan struktur yang sangat terstandardisasi dan fungsional dengan tujuan dirancang untuk menyampaikan analisis kebijakan kepada Anggota DPR RI secara ringkas dan efektif. Isu Sepekan disusun dengan struktur sebagai berikut: Pertama, bagian inti dokumen yang berisi

isu dan permasalahan. Bagian ini menyajikan latar belakang komprehensif isu yang diangkat, lengkap dengan konteks, data relevan, dan implikasinya bagi Indonesia. Kedua, bagian Atensi DPR yang merangkum poin-poin krusial dan memberikan rekomendasi kebijakan atau tindakan yang diharapkan dari DPR atau Alat Kelengkapan Dewan. Bagian atensi DPR menjadi ringkasan eksekutif yang harapannya dapat langsung ditindaklanjuti oleh AKD terkait. Kemudian bagian lain dilengkapi dengan abstraksi singkat dalam dua paragraf sebagai ringkasan dari isu, serta sumber referensi yang digunakan sebagai rujukan dari penyusunan Isu Sepekan.

Miss Rosida yang saat ini berfokus pada pemanfaatan kecerdasan buatan untuk publikasi kegiatan dan pengumpulan umpan balik dari publik dapat mengambil pelajaran berharga dari pola dan struktur Isu Sepekan Pusat Analisis Keparlemenan untuk meningkatkan kedalaman analisis dan dampak strategisnya. Misalnya dengan mengadopsi struktur Isu Sepekan untuk menyajikan analisis isu dalam AKD di bawah koordinasi Biro Persidangan II secara lebih komprehensif dan terarah. AI dapat dimanfaatkan untuk menyusun isu dan permasalahan kunci yang muncul dari publik, mirip dengan bagian "Isu dan Permasalahan" di Isu Sepekan yang menyajikan analisis mendalam berdasarkan data.

Selanjutnya, bagian Atensi DPR dalam Isu Sepekan yang secara eksplisit merumuskan rekomendasi atau langkah-langkah yang harus diambil oleh Alat Kelengkapan Dewan juga dapat diterapkan dalam Miss Rosida. Misalnya, jika banyak isu atau permasalahan menyoroti kebutuhan akan klarifikasi mengenai suatu kebijakan, AI Miss Rosida dapat memberikan narasi rekomendasi dalam rangka memecahkan masalah tersebut, sehingga narasi video Miss Rosida dapat menjadi masukan strategis yang dapat langsung diintegrasikan ke dalam proses legislatif dan pengambilan keputusan. Melalui hal tersebut, Miss Rosida diharapkan dapat memperkuat peran jangka panjangnya dari sekadar alat komunikasi menjadi kontributor yang lebih substansial terhadap fungsi DPR RI.

2. Pengorganisasian (*Organizing*)

Tahapan di atas juga berkaitan erat dengan tahapan ini. Sebab penulis melakukan kegiatan untuk mengumpulkan informasi dan memperdalam pemahaman terhadap implementasi inovasi berbasis kecerdasan buatan dan analisis substansif di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI melalui wawancara. Adapun dua orang yang diwawancarai merupakan Pegawai Biro Hukum yang terlibat dalam Inovasi *Artificial Intelligence for Recommendation and Analytics* (AIRA), serta wawancara dengan salah satu penulis Isu Sepekan di Pusat Analisis Keparlemenan. Penulis memperoleh informasi langsung

mengenai proses perancangan, penerapan, serta tantangan dalam pengembangan sistem berbasis AI dan analisis substantif pada kedua unit kerja tersebut. Hasil wawancara tersebut menjadi dasar penting dalam penyusunan analisis *benchmarking*, karena memberikan gambaran konkret mengenai praktik terbaik maupun strategi implementasi dalam mendukung transformasi digital di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI.

Kegiatan pengorganisasian ini mencerminkan penerapan nilai BERAKHLAK, khususnya nilai Kompeten. Nilai ini tampak melalui menggali informasi dari sumber yang kredibel dan memahami penerapan inovasi secara mendalam guna menghasilkan analisis yang akurat dan relevan. Selain itu, kegiatan ini juga sejalan dengan semangat SMART ASN *Digital Culture*, yang menekankan pentingnya penguasaan literasi digital, kemampuan analitis berbasis data, dan pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung analisis yang dikerjakan.



Gambar V.3. Wawancara dengan Pegawai Biro Hukum terkait dengan Perancangan Inovasi AIRA



Gambar V.4 Wawancara dengan Salah Satu Penulis Isu Sepekan di Pusat Analisis Keparlemenan

3. Pengendalian (*Controlling*)

3.1 Survei Optimalisasi Perancangan Konten Interaktif AI Miss Rosida

Survei dilakukan untuk menilai sejauh mana efektivitas, daya tarik, dan relevansi konten Miss Rosida di mata para pegawai sejauh sudah diterapkan selama ini. Survei ini melibatkan 50 responden dari berbagai Biro dan Pusat. Hasilnya diharapkan memberikan gambaran komprehensif mengenai tingkat pengenalan terhadap Miss Rosida, persepsi terhadap kualitas konten yang ditampilkan, hingga masukan konkret untuk peningkatan aspek narasi, visual, dan interaktivitas yang akan diterapkan dalam tahapan pelaksanaan. Kegiatan survei ini mencerminkan penerapan nilai BERAKHLAK, khususnya nilai Akuntabel. Nilai ini tercermin dalam pelaksanaan evaluasi berbasis data dan bukti nyata sebagai bentuk tanggung jawab terhadap keberlanjutan dan peningkatan kualitas inovasi Miss Rosida. Sedangkan untuk nilai SMART ASN yang terkait yakni *digital safety* karena pengolahan data hanya digunakan untuk Aktualisasi Latsar dan adanya kerahasiaan informasi responden.

Bagian I – Informasi Responden

DEPUTI BIDANG PERSIDANGAN	
Nama Biro	Jumlah Responden
Biro Persidangan I	1 responden
Biro Persidangan II	2 responden
Biro Kesekretariatan Pimpinan	1 responden
Biro Kerja Sama Antar Parlemen dan Organisasi Internasional	2 responden
Biro Pemberitaan Parlemen	9 responden
Biro Protokol dan Humas	7 responden
DEPUTI BIDANG ADMINISTRASI	

Nama Biro	Jumlah Responden
Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat	2 responden
Biro SDMA	5 responden
Biro Keuangan	1 responden
Biro Pengelolaan Bangunan dan Wisma	1 responden
Biro Umum	3 responden
Biro Perencanaan dan Organisasi	2 responden
BADAN KEAHLIAN	
Nama Biro	Jumlah Responden
Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang	-
Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Polhukam	3 responden
Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Ekra	2 responden
Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara	-
Pusat Analisis Keparlemenan	2 responden
Pusat Teknologi Informasi	4 responden
Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Legislatif	3 responden
TOTAL	50 responden

Tabel V.2 Informasi Responden

Bagian II – Informasi Umum

. Apakah Anda mengetahui Konten MISS ROSIDA Biro Persidangan II?



Dari mana Anda mengetahui Konten MISS ROSIDA Biro Persidangan II?



Gambar V.5. Informasi Umum

Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden telah mengetahui keberadaan Miss Rosida (74%), meskipun masih terdapat sebagian kecil yang

belum mengenalnya sama sekali (26%). Hasil jawaban juga menunjukkan bahwa Portal DPR menjadi sumber utama bagi sebagian besar responden dalam mengakses atau mengenal konten MISS Rosida. Kanal resmi DPR masih menjadi medium yang paling kredibel dan sering diakses oleh pegawai internal maupun audiens terkait. Selain Portal DPR, WhatsApp Blast juga muncul sebagai salah satu kanal penyebarluasan yang efektif. Banyak responden menyebut bahwa mereka mengetahui konten MISS Rosida dari pesan siaran WhatsApp, yang menunjukkan bahwa strategi distribusi berbasis komunikasi langsung (*direct dissemination*) mampu meningkatkan visibilitas konten secara signifikan. Penggunaan kanal ini tampaknya menjangkau lebih banyak pegawai lintas unit, termasuk mereka yang mungkin tidak secara rutin membuka Portal DPR.

Sementara itu, YouTube menempati posisi ketiga sebagai sumber informasi yang disebutkan oleh sebagian responden. Meskipun belum dominan, keberadaan YouTube menunjukkan bahwa MISS Rosida mulai memasuki ekosistem media publik yang lebih luas dan terbuka. Hal ini dapat menjadi potensi besar bagi penguatan strategi publikasi melalui optimalisasi kanal video daring, terutama bila dipadukan dengan pendekatan konten visual yang lebih menarik.

Bagian III – Kualitas Konten

Jawab pertanyaan di bawah ini berdasarkan video yang telah Anda tonton:



Gambar V.6. Kualitas Konten

Hasil survei terhadap persepsi responden mengenai video Miss Rosida menunjukkan tingkat kepuasan yang baik di hampir seluruh indikator penilaian. Sebagian besar responden memberikan penilaian “Baik” dan “Sangat Baik” terhadap aspek-aspek utama seperti kejelasan narasi, daya tarik visual/grafis, relevansi topik, serta efektivitas video dalam mendorong partisipasi interaktif. Distribusi jawaban memperlihatkan bahwa porsi penilaian positif mendominasi dengan proporsi yang mendekati 80–90% dari total

responden, sementara hanya sebagian kecil yang menyatakan penilaian “Cukup” dan sangat sedikit yang menilai “Kurang” atau “Sangat Kurang”.

Pada aspek kejelasan narasi, mayoritas responden menilai bahwa penyampaian pesan dalam video Miss Rosida tergolong baik (sebesar 50%). Hal ini mengindikasikan bahwa struktur narasi telah tersusun secara runtut, menggunakan bahasa yang komunikatif, dan efektif dalam menjelaskan tujuan maupun isi pesan yang ingin disampaikan. Kejelasan narasi menjadi kekuatan utama dalam memastikan audiens mampu menangkap makna dan konteks video dengan cepat. Walau apabila dibandingkan dengan keempat pertanyaan lainnya, aspek kejelasan narasi memiliki penilaian ‘cukup’ yang paling tertinggi (sebesar 36%). Aspek daya tarik grafis dan visual mendapat penilaian terendah dibandingkan 4 pertanyaan lainnya. Responden menganggap bahwa tampilan visual dalam video Miss Rosida menarik, dinamis, dan mendukung pesan yang disampaikan (sebesar 60%). Walau pada aspek ini terdapat penilaian ‘kurang’ yang paling tinggi (10%) dan ‘cukup’ yang tergolong tinggi (28%). Temuan ini menunjukkan bahwa aspek estetika visual menjadi hal utama yang perlu dioptimalisasi dalam memperkuat efektivitas komunikasi digital yang dilakukan melalui Miss Rosida.

Selanjutnya, dari aspek relevansi dan signifikansi informasi, mayoritas responden menyatakan bahwa konten yang disajikan relevan dengan kebutuhan mereka di lingkungan kerja (64% responden menilai baik untuk aspek relevansi topik dan 70% responden menilai baik untuk aspek signifikansi informasi, penilaian tertinggi untuk kategori baik). Informasi yang ditampilkan dianggap bermanfaat dan berkaitan langsung dengan tugas maupun aktivitas dalam unit kerja, sehingga memberikan nilai tambah bagi pengguna. Hal ini menandakan bahwa kurasi topik dalam video Miss Rosida sudah sejalan dengan kebutuhan informasi aktual di biro.

Pada aspek partisipasi interaktif, responden juga memberikan penilaian positif. Sebagian besar merasa terdorong untuk berinteraksi, misalnya melalui fitur *like*, *share*, atau memberi tanggapan (68% responden menilai baik). Meskipun demikian, beberapa responden memberikan catatan agar interaktivitas dapat ditingkatkan, misalnya dengan menyisipkan ajakan eksplisit untuk berdialog atau mengisi survei lanjutan di akhir video. Terbukti dari masih ada 6% responden menilai kurang dan 20% menilai cukup. Hal ini membuka peluang untuk memperluas fungsi video tidak hanya sebagai media informasi, tetapi juga sebagai sarana kolaborasi digital internal.

Pada bagian ini dapat disimpulkan bahwa dalam lima aspek (kejelasan narasi, daya tarik grafis dan visual, aspek relevansi, aspek signifikansi informasi, dan aspek partisipasi

(Banggar) sebanyak 17 responden, serta Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) dan Panitia Khusus (Pansus) yang masing-masing memperoleh 15 dan 14 responden. Sementara itu, Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) dan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) menempati posisi berikutnya dengan jumlah responden yang sama, yaitu 11 orang.

Dominasi pilihan terhadap Baleg menunjukkan bahwa isu legislasi masih menjadi fokus utama perhatian para responden. Hal ini dapat dipahami mengingat Baleg memiliki peran strategis dalam penyusunan, pembahasan, dan perubahan undang-undang, termasuk pengelolaan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) yang menjadi sorotan publik. Sejumlah responden menekankan bahwa Baleg penting dibahas karena mencerminkan fungsi utama DPR sebagai lembaga pembentuk undang-undang serta menjadi wajah dari kinerja parlemen di mata masyarakat. Beberapa responden juga menyebut bahwa topik Baleg menarik karena kerap bersinggungan dengan isu-isu aktual yang terjadi di masyarakat ini.

Selain Baleg, Banggar dan BAM yang selanjutnya memperoleh perhatian besar. Banyak responden menilai kedua AKD ini memiliki peran signifikan dalam memperjuangkan kepentingan rakyat dan memastikan transparansi kebijakan anggaran. Banggar dinilai penting karena terlibat langsung dalam perumusan dan pengawasan APBN, sementara BAM dianggap vital sebagai kanal penyampaian aspirasi publik kepada DPR. Kombinasi keduanya mencerminkan dua sisi penting dalam representasi parlemen yakni fungsi alokasi sumber daya dan fungsi penyerapan aspirasi.

Hal yang lebih sedikit lainnya yakni responden yang memilih Pansus, BURT, dan BAKN karena alasan fungsional dan relevansi dengan unit kerja mereka di kesetjanaan DPR. Misalnya, BURT disebut berkaitan erat dengan tugas Biro Umum, sementara BAKN dinilai penting karena berhubungan dengan akuntabilitas keuangan negara. Responden yang memilih Pansus menilai lembaga ini perlu mendapat visibilitas lebih karena sering menangani isu-isu spesifik yang mendapat perhatian publik, namun secara kelembagaan belum banyak diulas secara mendalam di media internal DPR.

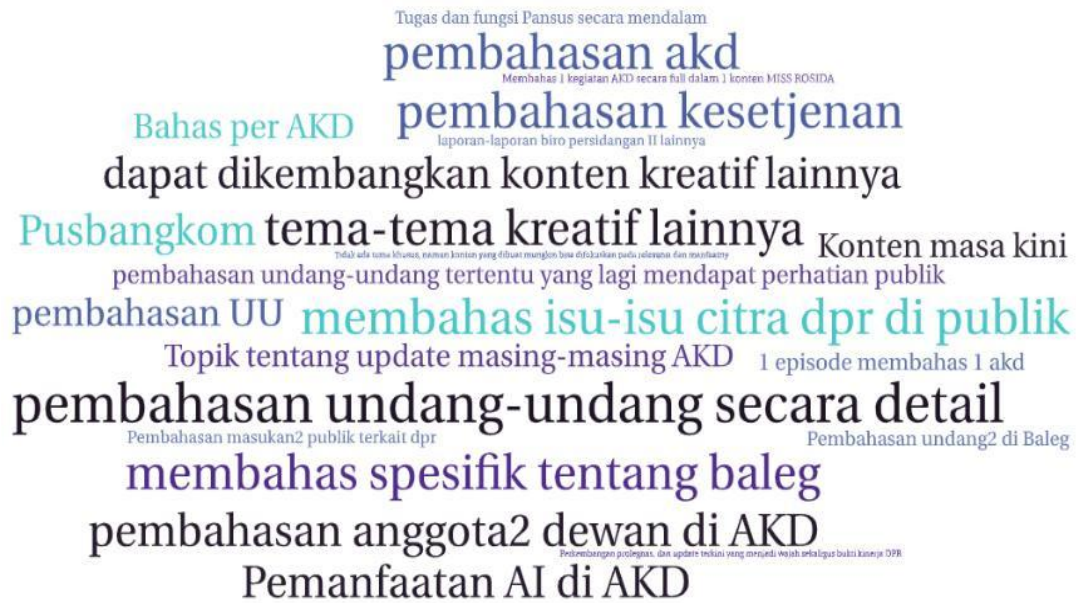
Sementara itu, MKD disebut oleh sebagian kecil responden karena dinilai jarang terdengar dan belum banyak dipahami. Beberapa responden juga mengaku memilih semua AKD untuk tetap ditampilkan karena masing-masing memiliki nilai edukatif dan informatif bagi publik internal. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan akan pemerataan informasi kelembagaan agar seluruh alat kelengkapan DPR mendapatkan ruang representasi yang proporsional dalam konten Miss Rosida.

Pada aspek relevansi, responden memberikan masukan agar konten video lebih terintegrasi dengan ekosistem digital di Setjen DPR dan lebih menonjolkan kaitan dengan fungsi serta kegiatan kelembagaan. Beberapa juga mengusulkan agar Miss Rosida berkolaborasi dengan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) lain maupun dengan bagian unit kerja lain seperti Metaksos, sehingga kontennya tidak hanya menjadi produk informasi internal, tetapi juga bagian dari ekosistem komunikasi publik DPR yang lebih luas. Selain itu, pembaruan informasi terkait kegiatan kedewanan diharapkan dilakukan secara lebih rutin. Hal ini menunjukkan bahwa audiens menilai relevansi konten akan meningkat jika mampu menampilkan hubungan yang kuat antara teknologi, institusi, dan konteks kerja Setjen DPR.

Pada aspek signifikansi informasi, terdapat masukan seperti “informasi lengkap, detail, dan akurat” serta “pembahasan lebih mendalam” yang menegaskan harapan agar video tidak hanya menampilkan ringkasan kegiatan, tetapi juga menjelaskan latar belakang, tujuan, dan dampaknya bagi publik. Responden juga mendorong penggunaan *Artificial Intelligence* yang lebih optimal dalam mendukung penyajian informasi, baik dari segi analisis maupun pengolahan data visual. Peningkatan pada aspek ini akan menjadikan konten Miss Rosida menjadi sarana edukasi yang bernilai strategis bagi masyarakat.

Pada aspek partisipasi interaktif, beberapa responden mendorong agar promosi video Miss Rosida digencarkan, terutama dengan memanfaatkan potensi AI sebagai daya tarik utama. Usulan seperti menyisipkan humor ringan, memperpanjang durasi, serta memperbanyak frekuensi unggahan menunjukkan keinginan audiens untuk terlibat lebih lama dan lebih aktif dengan konten. Pendekatan yang lebih komunikatif, ringan, dan bersahabat dinilai akan meningkatkan *engagement* dan memperluas jangkauan penonton, baik di lingkungan internal Setjen DPR maupun di masyarakat luas.

Apa topik/tema yang ingin Anda usulkan pada video MISS ROSIDA ke depan?



Gambar V.10. Wordclouding Hasil Survei (3)

Sebagian besar responden mengusulkan tema-tema yang paling banyak disebut berkaitan dengan pembahasan undang-undang, perkembangan Program Legislasi Nasional (Prolegnas), serta kegiatan alat kelengkapan dewan (AKD) seperti Badan Legislasi (Baleg) atau Panitia Khusus (Pansus). Responden menilai bahwa topik semacam ini akan menggambarkan kinerja DPR secara konkret dan meningkatkan pemahaman publik terhadap proses legislasi dan pengawasan di parlemen.

Selain itu, muncul pula gagasan agar setiap episode video Miss Rosida membahas satu AKD secara mendalam. Pola ini dinilai akan memberi ruang untuk menggali detail kegiatan, capaian, serta tantangan dari masing-masing AKD, sehingga audiens memperoleh gambaran utuh tentang peran dan kontribusi setiap bagian dalam sistem kelembagaan DPR. Beberapa responden juga menyarankan agar topik dikembangkan berdasarkan isu-isu aktual yang sedang mendapat perhatian publik, seperti pembahasan rancangan undang-undang tertentu atau wacana kebijakan yang sedang ramai diperbincangkan.

Dari sisi substansi, sebagian responden menekankan pentingnya menampilkan relevansi dan dampak kegiatan DPR terhadap masyarakat. Usulan seperti “fokus pada manfaat bagi publik” menunjukkan harapan agar konten tidak hanya berisi laporan kegiatan, melainkan juga mengaitkannya dengan nilai tambah yang dirasakan oleh masyarakat. Beberapa responden juga mengusulkan tema-tema yang bersifat inovatif dan futuristik, seperti pemanfaatan AI di AKD atau penerapan teknologi digital dalam

mendukung fungsi legislasi dan pengawasan. Topik semacam ini dapat memperkuat citra modern dan progresif DPR, serta menunjukkan komitmen lembaga terhadap adaptasi teknologi dalam kerja-kerja kelembagaan.

3.2 Analisis *Engagement Rate (ER)* Miss Rosida Biro Persidangan II

Analisis ER terhadap konten Miss Rosida dilakukan untuk mengukur sejauh mana efektivitas strategi komunikasi digital yang telah dijalankan, khususnya dalam menarik dan mempertahankan interaksi audiens terhadap setiap video yang dipublikasikan. Pengukuran ini akan melihat sejauh mana tingkat keterpaparan (*views*) dan kedalaman keterlibatan audiens melalui respons aktif seperti *likes* dan *comments*. Melalui analisis akan diidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan atau penurunan performa konten. Analisis ini juga bertujuan untuk menjadi dasar pengambilan keputusan strategis dalam optimalisasi konten Miss Rosida ke depan, agar lebih relevan, menarik, dan mampu membangun hubungan yang lebih interaktif dengan audiens internal maupun publik. Kegiatan analisis ini mencerminkan penerapan nilai BERAHLAK, khususnya nilai Akuntabel. Nilai ini tercermin melalui tanggung jawab dalam melakukan evaluasi berbasis data dan bukti kinerja nyata, guna memastikan setiap langkah pengembangan konten dilakukan secara terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.

No	Judul	Tanggal Rilis	Views	Like	ER
1	UPDATE KEGIATAN AKD ROSID II Miss Rosida (AI) Edisi 6/2025	15 September 2025	185	23	12,43%
2	UPDATE KEGIATAN AKD ROSID II Miss Rosida (AI) Edisi 2/2025	13 Juli 2025	431	47	10,90%
3	UPDATE KEGIATAN AKD ROSID II Miss Rosida (AI) Edisi 5/2025	26 Agustus 2025	200	21	10,50%
4	MENGENAL AKD DI BIRO PERSIDANGAN II Miss Rosida Edisi 1/2025	4 Juli 2025	611	49	8,02%
5	UPDATE KEGIATAN AKD ROSID II Miss Rosida (AI) Edisi 3/2025	19 Juli 2025	429	32	7,46%
6	UPDATE KEGIATAN AKD ROSID II Miss Rosida (AI) Edisi 4/2025	27 Juli 2025	831	53	6,38%
Tabel V.3 Analisis <i>Engagement Rate (ER)</i> 6 Episode Miss Rosida					

Analisis terhadap video Miss Rosida dilakukan dengan teknik *Engagement Rate (ER)*. ER adalah metrik kunci dalam analisis konten digital yang digunakan untuk mengukur tingkat interaksi audiens terhadap suatu konten. Metrik ini memberikan

gambaran tentang seberapa efektif suatu konten dalam memicu respons aktif dari penonton tidak sekadar berdasarkan jumlah tayangan (*views*). ER dihitung dengan membandingkan jumlah 'suka' (*likes*) yang diterima suatu video dengan jumlah penayangan (*views*) yang diperoleh video tersebut, kemudian hasilnya dikalikan 100% untuk mendapatkan persentase. Asumsi pembacaan terhadap ER adalah semakin tinggi nilai ER, semakin besar kemungkinan konten tersebut relevan, menarik, atau berhasil memotivasi audiens untuk berinteraksi.

Berdasarkan data enam video MISS ROSIDA yang sudah rilis di atas, terlihat bahwa secara total, konten tersebut telah mengumpulkan 2.687 penayangan dan 225 suka, menghasilkan rata-rata ER secara kumulatif sekitar 8,37%. Angka ini mengindikasikan bahwa untuk setiap 100 penayangan, rata-rata terdapat sekitar 8,37 *likes*. Analisis juga dilakukan pada setiap episode yang ada sehingga terlihat jelas adanya variasi terkait angka ER antar episode. Pada episode pertama, terdapat judul yang bersifat informatif dan pengenalan dengan ER yang cukup stabil (8,02%). Namun, pada episode-episode berikutnya dengan judul yang hampir seragam, pola kinerja ER menunjukkan fluktuasi.

Episode 2 mencapai ER tertinggi kedua sehingga mengindikasikan bahwa konten tersebut sangat relevan atau disajikan secara menarik bagi penonton. Walau terdapat kontras di mana Episode 4 meskipun mencatat jumlah penayangan tertinggi (831 *views*) justru memiliki ER terendah (6,38%). Fenomena ini menyiratkan bahwa daya tarik awal (yang mungkin dipengaruhi oleh judul atau waktu rilis) berhasil menarik penonton, tetapi konten tidak dapat mempertahankan minat atau memotivasi mereka untuk berinteraksi lebih lanjut. Selanjutnya pada Episode 5 dan Episode 6, meskipun memiliki jumlah penayangan yang lebih rendah, kedua episode ini berhasil mencapai ER yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa kedua episode tersebut memiliki resonansi yang kuat dengan segmen audiens yang lebih kecil.

Berdasarkan analisis tersebut, terdapat beberapa indentifikasi sebagai prioritas untuk peningkatan guna mengoptimalkan efektivitas konten MISS ROSIDA. *Pertama*, dapat dilakukan strategi judul karena keseragaman judul untuk sebagian besar episode mungkin mengurangi daya tarik unik setiap konten. Disarankan untuk mengembangkan strategi penjudulan yang lebih variatif, spesifik, dan memancing rasa ingin tahu. Judul yang lebih deskriptif dan menonjolkan nilai tambah spesifik setiap *update* akan meningkatkan rasio klik-tayang.

Kedua, dapat dilakukan optimalisasi struktur narasi karena adanya kesenjangan antara ketertarikan awal dan motivasi untuk berinteraksi. Penguatan struktur narasi dapat

berupa *hook* pembuka yang kuat. Dalam 5-15 detik pertama, video harus langsung menarik perhatian penonton dan mengkomunikasikan nilai utama konten. Begitu pula dengan alur informasi yang jelas (ringkas, mudah dicerna, dan relevan dengan ekspektasi audiens). Serta menambahkan narasi *Call to Action* (CTA) yang eksplisit. Misalnya ajakan untuk berinteraksi (misalnya, "Sampaikan pertanyaan Anda di kolom komentar", "Bagikan pandangan Anda tentang isu ini", atau "Klik suka jika informasi ini bermanfaat") di sepanjang atau di akhir video. Hal ini dapat meningkatkan tingkat keterlibatan secara signifikan.

Ketiga, diperlukan konsistensi dan perencanaan jadwal rilis. Pola rilis yang terkonsentrasi pada Juli dan kemudian merenggang pada Agustus-September dapat memengaruhi ekspektasi dan kebiasaan audiens. Jadwal rilis yang lebih teratur dan dapat diprediksi akan membantu membangun basis audiens yang setia dan mempertahankan momentum interaksi. Selain itu, perencanaan topik konten harus diintegrasikan dengan isu-isu aktual yang relevan dengan tugas Biro Persidangan II dan kebutuhan audiens internal untuk menjaga relevansi tinggi.

4. Pelaksanaan (*Actuating*)

4.1. Pembuatan Video Konten Interaktif MISS ROSIDA

Berdasarkan analisis *benchmarking*, survei, dan *engagement rate*, penulis mulai membuat video konten Interaktif Miss Rosida. Pembuatan video dilakukan dengan menyusun *story board* video terlebih dahulu dengan pembagian tiga kolom: (1) pertanyaan pemantik untuk penyusunan *story/script* video; (2) keterkaitan tiga analisis dengan narasi video; (3) dan narasi video. Kegiatan ini juga mencerminkan penerapan nilai BERAHLAK, khususnya nilai Adaptif. Nilai ini tampak dari upaya dalam merespons perkembangan teknologi dan tren komunikasi digital dengan cara mengintegrasikan hasil analisis data ke dalam proses kreatif pembuatan konten. Sedangkan terkait nilai SMART ASN, terdapat nilai *digital skill* dalam pembuatan video konten interaktif karena menggunakan aplikasi khusus berbasis AI sehingga dibutuhkan kemampuan digital yang lebih dalam pengelolaannya. Adapun rincian *story board* sebagai berikut:

Pertanyaan	Kaitan Analisis	Narasi Video
Judul Video	1. Analisis ER: Mengembangkan strategi penjudulan yang lebih variatif, spesifik, dan memancing rasa ingin tahu. Judul yang lebih deskriptif dan menonjolkan nilai tambah spesifik setiap <i>update</i> akan meningkatkan rasio klik-tayang.	Apa Itu Prolegnas? Begini Cara DPR Menyusun Undang-Undang! #PahamBersidang #MissRosida
Pembuka: Apa	1. Analisis ER: topik konten harus	Setiap tahun, DPR RI punya banyak

Pertanyaan	Kaitan Analisis	Narasi Video
maksud Prolegnas? Dan apa kaitannya dengan Baleg DPR RI	diintegrasikan dengan isu-isu aktual yang relevan dengan tugas Biro Persidangan II dan kebutuhan audiens internal untuk menjaga relevansi tinggi. 2. Analisis survei: Baleg memiliki peran strategis dalam penyusunan, pembahasan, dan perubahan undang-undang, termasuk pengelolaan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) yang menjadi sorotan publik. Sejumlah responden menekankan bahwa Baleg penting dibahas karena mencerminkan fungsi utama DPR sebagai lembaga pembentuk undang-undang serta menjadi wajah dari kinerja parlemen di mata masyarakat. Beberapa responden juga menyebut bahwa topik Baleg menarik karena kerap bersinggungan dengan isu-isu aktual yang terjadi di masyarakat ini.	rencana membuat undang-undang. Prolegnas, atau Program Legislasi Nasional, adalah daftar rencana undang-undang yang disusun DPR bersama pemerintah. Ibaratnya, ini adalah daftar kerja DPR di bidang pembentukan hukum. Tujuannya sederhana: supaya pembuatan undang-undang lebih terarah dan sesuai kebutuhan rakyat. Lalu, siapa yang menyusun Prolegnas? Jawabannya: Baleg DPR RI! Badan Legislasi ini menyusun Prolegnas dengan mengumpulkan usulan RUU, menilai dan menentukan prioritas undang-undang setiap tahun.
Apa bedanya prolegnas prioritas dan prolegnas jangka menengah?	1. Analisis survei: responden memberikan masukan agar konten lebih menonjolkan kaitan dengan fungsi serta kegiatan kelembagaan.	Tahukah kamu? Prolegnas dibagi jadi dua jenis: Prolegnas Jangka Menengah dan Prolegnas Prioritas. Prolegnas Jangka Menengah adalah rencana pembentukan undang-undang untuk satu periode DPR. Sementara Prolegnas Prioritas disusun tiap tahun untuk menentukan RUU yang paling penting dibahas.
Apa bedanya RUU Biasa dan RUU Kumulatif terbuka, serta maksud dari <i>carry over</i> undang-undang	1. Analisis Benchmarking: latar belakang komprehensif isu yang diangkat, lengkap dengan konteks, data relevan, dan implikasinya bagi Indonesia. 2. Analisis survei: beberapa responden memberikan catatan agar interaktivitas dapat ditingkatkan, misalnya dengan menyisipkan ajakan eksplisit untuk berdialog atau mengisi survei lanjutan di akhir video.	Untuk tahun ini, ditetapkan 67 RUU yang menjadi Prolegnas Prioritas Tahun 2026. Dan 5 RUU Kumulatif Terbuka. Apa bedanya RUU biasa dengan Kumulatif Terbuka? RUU biasa sudah masuk dalam Prolegnas dan dibahas sesuai prioritas. Sedangkan RUU Kumulatif Terbuka tidak harus masuk Prolegnas, tapi dibahas kapan saja karena bersifat mendesak. Ada juga istilah <i>carry over</i>, artinya RUU yang pembahasannya dilanjutkan dari masa sidang lalu. Berikut 67 RUU dan 5 daftar RUU kumulatif terbuka Prolegnas Prioritas 2026 yang disepakati:
Penutup	1. Analisis ER: menambahkan narasi Call to Action (CTA) yang eksplisit. Misalnya ajakan untuk berinteraksi (misalnya, "Sampaikan pertanyaan Anda di kolom komentar", "Bagikan pandangan Anda	Nah, sekarang kamu sudah tahu kan, apa itu Prolegnas, siapa yang menyusunnya, dan bagaimana prosesnya berjalan?

Pertanyaan	Kaitan Analisis	Narasi Video
	tentang isu ini", atau "Klik suka jika informasi ini bermanfaat") di sepanjang atau di akhir video. 2. Analisis survei: beberapa responden memberikan catatan agar interaktivitas dapat ditingkatkan, misalnya dengan menyisipkan ajakan eksplisit untuk berdialog atau mengisi survei lanjutan di akhir video.	Semua undang-undang ini dibuat untuk kepentingan rakyat, jadi penting banget buat kita ikut peduli dan paham prosesnya. Miss Rosida tunggu masukanmu terhadap undang-undang tersebut di kolom komentar atau scan QR Code berikut ini, ya!

Setelah menyusun *story board*, langkah berikutnya adalah menerjemahkan narasi video menjadi *prompt* untuk menghasilkan klip-klip video interaktif. *Prompt* perlu dibuat secara mendetail dimulai dari deskripsi tokoh Miss Rosida, teknik desain klip video, gerak kamera, *mood* video, audio pendukung, hingga dialog yang diucapkan. Adapun penerjemahan narasi video menjadi *prompt* sebagai modal dasar pembuatan video AI sebagai berikut:

Narasi Video	Prompt Video
Setiap tahun, DPR RI punya banyak rencana membuat undang-undang.	<i>Close-up shot of a young Indonesian woman named Miss Rosida, with short wavy dark hair, wearing a white blouse, standing in a bright, elegant government-style hall with tall arched windows. She smiles warmly and speaks to the camera with confidence. The background is softly blurred to focus on her face. Natural daylight fills the room, creating a calm and professional atmosphere. Camera movement is steady and cinematic, shallow depth of field. Mood: educational, friendly, and inspiring. Audio: soft instrumental background music. Dialogue: 'Setiap tahun, DPR RI punya banyak rencana membuat undang-undang' Style: realistic, clean lighting, 4K cinematic quality.</i>
Prolegnas, atau Program Legislasi Nasional, adalah daftar rencana undang-undang yang disusun DPR bersama pemerintah agar pembentukan hukum lebih terarah, sesuai kebutuhan rakyat, dan sejalan dengan prioritas nasional.	<i>Cinematic animation illustrating the concept of national legislation planning in Indonesia. Scene opens with the Indonesian Parliament building in daylight, then transitions to symbolic visuals: stacks of law books, moving documents labeled 'RUU', and animated flow lines connecting the DPR building and the government palace. The visuals convey cooperation between institutions. Subtle overlay icons show teamwork, planning, and discussion. Lighting is warm, with golden tones suggesting optimism and progress. Mood: educational, inspiring, and professional. Audio: soft orchestral background music. Voice-over: female Indonesian narrator with a calm, warm, and clear tone — mid-range voice, natural intonation, slightly formal like a government educational video. Dialogue (8 seconds): 'Prolegnas, atau Program Legislasi Nasional, adalah daftar rencana undang-undang yang disusun DPR bersama pemerintah agar pembentukan hukum lebih terarah, sesuai kebutuhan rakyat, dan sejalan dengan prioritas nasional.' Style: realistic-cinematic motion graphic, 4K quality, video length 8 seconds.</i>
Ibaratnya, ini adalah daftar kerja DPR di bidang pembentukan hukum. Tujuannya sederhana: supaya pembuatan undang-undang lebih terarah dan sesuai kebutuhan rakyat	<i>Cinematic animation visualizing legislative planning in Indonesia. Scene shows animated folders and documents labeled 'Prolegnas' being organized neatly on a virtual desk, symbolizing DPR's structured work plan. Transition to a meeting table scene where animated silhouettes of lawmakers discuss documents with glowing charts and legal symbols hovering above. Visuals emphasize coordination, order, and purpose in lawmaking. Lighting is warm with gold accents to symbolize guidance and clarity. Mood: educational, calm, and inspiring. Audio: light orchestral background music continuing from previous scene. Voice-over: female Indonesian narrator, same voice tone and pacing as the previous video. Dialogue (8 seconds): 'Ibaratnya, ini adalah daftar kerja DPR di bidang pembentukan hukum. Tujuannya sederhana: supaya pembuatan undang-undang lebih terarah dan sesuai kebutuhan rakyat.' Style:</i>

Narasi Video	Prompt Video
	<i>realistic-cinematic motion graphic, 4K, video length 8 seconds.</i>
Supaya pembuatan undang-undang lebih terarah dan sesuai kebutuhan rakyat. Lalu, siapa yang menyusun Prolegnas? Jawabannya: Baleg DPR RI! Badan Legislasi ini bertugas mengumpulkan usulan RUU, menilai, lalu menyusun daftar prioritas yang akan dibahas setiap tahun	<i>Cinematic animation showing the process of legislative coordination in Indonesia. Scene begins with animated documents labeled 'RUU' moving along a glowing digital pathway toward a building labeled Baleg DPR RI. Inside the building, silhouettes of legislators are shown analyzing papers, highlighting sections, and placing documents into labeled folders such as 'Prioritas'. The visuals represent teamwork, evaluation, and planning. Animated icons of scales, checklists, and meeting tables float subtly to symbolize fairness and structure. Lighting: warm daylight tones with golden highlights to reflect optimism and order. Mood: informative, professional, and inspiring. Audio: soft orchestral background music, same tone and tempo as previous scenes for smooth continuity. Voice-over: female Indonesian narrator, calm and confident tone, same voice style as reference video. Dialogue (10 seconds): 'Supaya pembuatan undang-undang lebih terarah dan sesuai kebutuhan rakyat. Lalu, siapa yang menyusun Prolegnas? Jawabannya: Baleg DPR RI! Badan Legislasi ini bertugas mengumpulkan usulan RUU, menilai, lalu menyusun daftar prioritas yang akan dibahas setiap tahun.' Style: realistic cinematic motion graphic, 4K, video length 10 seconds. Smooth transition from previous scene</i>
Tahukah kamu? Prolegnas dibagi jadi dua jenis: Prolegnas Jangka Menengah dan Prolegnas Prioritas	<i>Cinematic animation introducing the concept of two categories within Prolegnas. Scene begins with the Indonesian Parliament building seen from above, then text fades in: 'Apa bedanya Prolegnas Prioritas dan Prolegnas Jangka Menengah?' The camera slowly pans forward as the text divides into two glowing paths labeled 'Prioritas' and 'Jangka Menengah'. Warm daylight lighting, gold and soft beige tones symbolizing clarity and knowledge. Ambient room tone only — no background music. Mood: calm, educational, and professional. Voice-over: female Indonesian narrator, same tone and clarity as previous scenes. Dialogue (8 seconds): 'Tahukah kamu? Prolegnas dibagi jadi dua jenis: Prolegnas Jangka Menengah dan Prolegnas Prioritas.' Style: realistic cinematic motion-graphic, 4K quality, video length 8 seconds. Smooth fade-in transition from previous scene.</i>
Prolegnas Jangka Menengah adalah rencana pembentukan undang-undang untuk satu periode DPR. Sementara Prolegnas Prioritas disusun tiap tahun untuk menentukan RUU yang paling penting dibahas.	<i>Cinematic animation illustrating the concept of Prolegnas Prioritas. Scene transitions from the five-year timeline of Prolegnas Jangka Menengah into a new animated yearly cycle — a circular timeline labeled 'Disusun Setiap Tahun'. Glowing document icons labeled 'RUU Prioritas' appear one by one, then several are highlighted in gold to represent the most important bills chosen for discussion. Subtle animation of the DPR building in the background emphasizes the annual review process. Lighting: bright, warm daylight with golden accents showing focus and renewal. Ambient sound only — light paper shuffle, soft office tone, no background music. Mood: professional, focused, and explanatory. Voice-over: female Indonesian narrator, calm, clear, and authoritative tone (same as previous scenes). Dialogue (8 seconds): 'Prolegnas Jangka Menengah adalah rencana pembentukan undang-undang untuk satu periode DPR. Sementara Sementara Prolegnas Prioritas disusun tiap tahun untuk menentukan RUU yang paling penting dibahas.' Style: realistic cinematic motion graphic, 4K quality, video length 8 seconds. Smooth transition from previous scene (Jangka Menengah) showing shift from long-term to annual focus</i>
Untuk tahun ini, ditetapkan 67 RUU yang menjadi Prolegnas Prioritas Tahun 2026. Dan 5 RUU Kumulatif Terbuka.	<i>"Cinematic animation showing the scale of legislative planning for 2026. Scene opens with the DPR RI building at sunrise, symbolizing a new year of work. Dozens of glowing document icons labeled 'RUU' appear and gradually form the number 67 in the air — representing 67 RUU Prioritas. Then, five additional documents in silver glow hover beside them, symbolizing the 5 RUU Kumulatif Terbuka. Only minimal on-screen text: 'Prolegnas Prioritas 2026' appears briefly at the bottom. Lighting: bright and optimistic golden daylight. Ambient sound only — soft paper rustle and faint office echo, no background music. Mood: informative, dignified, and inspiring. Voice-over: female Indonesian narrator, calm and clear tone (same as previous scenes). Dialogue (8 seconds): 'Untuk tahun ini, ditetapkan 67 RUU yang menjadi Prolegnas Prioritas Tahun 2026, dan 5 RUU Kumulatif Terbuka.' Style: realistic cinematic motion graphic, 4K quality, video length 8 seconds.</i>

Narasi Video	Prompt Video
	<i>Smooth fade transition from the previous scene</i>
Apa bedanya RUU biasa dengan Kumulatif Terbuka? RUU biasa sudah masuk dalam Prolegnas dan dibahas sesuai prioritas. Sedangkan RUU Kumulatif Terbuka tidak harus masuk Prolegnas, tapi dibahas kapan saja karena bersifat mendesak.	<i>Cinematic animation illustrating the concept of RUU Kumulatif Terbuka. Scene transitions smoothly from the split-screen, focusing on the right side labeled 'Kumulatif Terbuka'. The folder opens, and glowing document icons fly in dynamically from various directions — symbolizing that these RUU can enter discussion anytime. One document glows brighter to represent an urgent or special case, while a clock icon fades in subtly to signify urgency. Lighting: warm golden tone with subtle motion blur for emphasis. Minimal on-screen text — only 'RUU Kumulatif Terbuka' appears briefly. Ambient sound only — soft paper movement and faint echo, no background music. Mood: dynamic, clear, and professional. Voice-over: female Indonesian narrator, calm and firm tone, same as previous scenes. Dialogue (8 seconds): 'Apa bedanya RUU biasa dengan Kumulatif Terbuka? RUU biasa sudah masuk dalam Prolegnas dan dibahas sesuai prioritas. Sedangkan RUU Kumulatif Terbuka tidak harus masuk Prolegnas, tapi dibahas kapan saja karena bersifat mendesak.' Style: realistic cinematic motion graphic, 4K quality, video length 8 seconds. Smooth transition from previous split-screen scene focusing on the right side.</i>
Ada juga istilah <i>carry over</i> , artinya RUU yang pembahasannya dilanjutkan dari masa sidang lalu.	<i>Cinematic animation illustrating the concept of Carry Over in the legislative process. Scene begins with a calendar flipping from one year to the next, symbolizing transition between legislative sessions. An animated document labeled 'RUU' moves along a glowing pathway from a folder marked 'Masa Sidang Lalu' into a new folder labeled 'DPR Berikutnya'. A smooth glowing trail follows the document, representing continuity of discussion. Lighting: warm daylight tones with gold accents to convey stability and progress. Minimal on-screen text — only the folder labels appear briefly. Ambient sound only — soft paper rustle and faint page flip, no background music. Mood: calm, explanatory, and reassuring. Voice-over: female Indonesian narrator, same tone and clarity as previous scenes. Dialogue (8 seconds): 'Ada juga istilah carry over, artinya RUU yang pembahasannya dilanjutkan dari masa sidang lalu.' Style: realistic cinematic motion graphic, 4K quality, video length 8 seconds. Smooth transition from previous scene (RUU Kumulatif Terbuka).</i>
Berikut 67 RUU dan 5 daftar RUU kumulatif terbuka Prolegnas Prioritas 2026 yang disepakati	<i>Cinematic animation showing the formal presentation of Prolegnas Prioritas 2026. Scene opens with a wide shot of the DPR RI plenary hall, softly lit in warm daylight. Dozens of glowing document icons (representing RUU) rise upward in organized rows, forming a structured pattern that subtly shapes the number 67. Then, five additional glowing silver documents appear beside them, symbolizing 5 RUU Kumulatif Terbuka. Only minimal text at the bottom fades in briefly: 'Prolegnas Prioritas 2026'. Lighting: bright, gold-toned to symbolize formality and optimism. Ambient sound only — faint paper movement and quiet hall atmosphere, no background music. Mood: dignified, informative, and conclusive. Voice-over: female Indonesian narrator, calm and authoritative tone (same voice as previous scenes). Dialogue (8 seconds): 'Berikut 67 RUU dan 5 daftar RUU Kumulatif Terbuka Prolegnas Prioritas 2026 yang disepakati.' Style: realistic cinematic motion graphic, 4K quality, video length 8 seconds. Smooth fade transition from previous scene (carry over)</i>
Nah, sekarang kamu sudah tahu kan, apa itu Prolegnas, siapa yang menyusunnya, dan bagaimana prosesnya berjalan? Semua undang-undang ini dibuat untuk kepentingan rakyat, jadi penting banget buat kita ikut peduli dan paham prosesnya.	<i>Cinematic animation highlighting that all laws are made for the people. Scene transitions from the DPR building to a warm, symbolic visual of diverse Indonesian citizens silhouettes of people from different professions standing together under soft daylight. Behind them, faint overlays of the Indonesian map and Garuda emblem appear, symbolizing unity and national purpose. Lighting: bright and golden, evoking optimism and togetherness. No on-screen text, focus purely on visuals and message. Ambient sound only — soft breeze and subtle crowd ambience, no background music. Mood: warm, inspiring, and inclusive. Voice-over: female Indonesian narrator, gentle and heartfelt tone (same as previous scenes). Dialogue (8 seconds): 'Nah, sekarang kamu sudah tahu kan, apa itu Prolegnas, siapa yang menyusunnya, dan bagaimana prosesnya berjalan? Semua undang-undang ini dibuat untuk kepentingan rakyat, jadi penting banget buat kita ikut peduli dan paham prosesnya.' Style: realistic cinematic motion graphic, 4K quality, video length 8 seconds. Smooth transition from previous scene (Prolegnas summary)</i>

Narasi Video	Prompt Video
Miss Rosida tunggu masukanmu terhadap undang-undang tersebut di kolom komentar atau scan QR Code berikut ini, ya!	<i>Cinematic animation closing the video with Miss Rosida inviting viewers to participate. Scene shows Miss Rosida standing in front of a clean, softly lit background featuring subtle national elements — a Garuda emblem watermark and faint red-and-white gradient. She smiles warmly and gestures toward a floating QR code beside her. On-screen, a short text fades in briefly: 'Scan QR Code atau tulis pendapatmu di kolom komentar!' Lighting: bright and friendly with soft golden tones.</i> <i>Ambient sound only — light room tone and gentle movement sound, no background music. Mood: warm, engaging, and sincere.</i> <i>Voice-over: female Indonesian narrator (Miss Rosida's voice), cheerful and natural tone. Dialogue (8 seconds): 'Miss Rosida tunggu masukanmu terhadap undang-undang tersebut di kolom komentar atau scan QR Code berikut ini, ya!'</i> <i>Style: realistic cinematic animation, 4K quality, video length 8 seconds. Smooth fade-out at the end to white or DPR RI logo.</i>

Tabel V.4. Story Board Video Konten Interaktif Miss Rosida

Prompt video yang sudah disusun diupload masing-masing bagian pada Aplikasi Berbasis AI sehingga menghasilkan klip-klip video. Puluhan klip tersebut kemudian dihimpun menjadi video utuh dengan menggunakan aplikasi editor video. Adapun Video Interaktif yang berjudul **Apa Itu Prolegnas? Begini Cara DPR Menyusun Undang-Undang! #PahamBersidang #MissRosida** selengkapnya dapat diakses pada tautan berikut:

<https://bit.ly/MissRosidaLatsar1>

N o	Sebelum	Sesudah	Keterangan
1.	UPDATE KEGIATAN AKD ROSID II – MISS ROSIDA	Apa Itu Prolegnas? Begini Cara DPR Menyusun Undang-Undang! #PahamBersidang #MissRosida	Sebelum: Judul sama dalam beberapa episode Sesudah: Judul lebih kreatif, substansif, dan memuat pertanyaan terbuka

2.			Sebelum: Hanya menampilkan jadwal AKD Sesudah: membahas isu-isu substansif berdasar masukan survei (c.q. Prolegnas Prioritas dalam Baleg)
3.			Sebelum: fokus pada tokoh Miss Rosida dalam menyampaikan informasi Sesudah: lebih banyak menampilkan desain grafis yang <i>eye-catching</i>
4.	-	 	Sebelum: belum ada Sesudah: menggunakan <i>Qr-code</i> dan/atau kolom komentar untuk mengakses dokumen dan memberikan masukan terhadap konten Miss Rosida, sehingga mendorong partisipasi yang lebih substansif.

Tabel V.5. Tabel Perbandingan Optimalisasi Konten Miss Rosida

Selain konten di atas, serta berdasarkan hasil analisis yang sudah dilakukan, terdapat beberapa usulan topik konten ke depan yang strategis untuk dikerjakan, antara lain:

No	Judul	Kaitan dengan Hasil Analisis Survei dan <i>Benchmarking</i>
1.	Anggaran untuk Rakyat: Begini Cara Banggar Kawal APBN!	Berdasarkan hasil survei yang menunjukkan Banggar dinilai strategis. Judul ini juga memiliki potensi engagement tinggi karena menyentuh tema akuntabilitas dan transparansi keuangan negara yang dekat dengan publik.
2.	BAM Bukan Cuma Terima Aspirasi, Tapi Juga Analisisnya! Yuk Kenalan Lebih Dekat!	Berdasarkan hasil survei, BAM dinilai vital karena memperjuangkan aspirasi publik. Judul ini berpotensi mendorong partisipasi aktif (komentar/pertanyaan), cocok dengan usulan responden tentang peningkatan interaktivitas.
3.	Pansus Itu Apa, Sih? Kenapa Sering Jadi Sorotan Waktu Bahas Isu Panas?	Berdasarkan hasil survei, Pansus menarik perhatian karena sering muncul dalam isu publik namun belum banyak dipahami. Konten ini edukatif dan bisa dikemas dengan storytelling ringan dan visual naratif seperti timeline kasus.
4.	Miss Rosida Ngobrolin Isu Panas Minggu Ini: RUU Apa yang Lagi Ramai?	Berdasarkan inspirasi Isu Sepekan Pusat Analisis Keparlemenan, judul ini bisa jadi segmen bulanan. AI Miss Rosida dapat menampilkan tren RUU populer dari data publik dan sentimen sosial media.
5.	Dari Ruang Sidang ke Layar Anda: Begini Cara DPR Bikin UU Jadi Nyata!	Menyasar tema besar “fungsi legislasi” yang paling diminati responden. Bisa menjadi episode pembuka untuk seri “mini-dokumenter AI interaktif” Miss Rosida yang menjelaskan proses pembentukan undang-undang secara ringkas dan visual.

Tabel V.6 Usulan Konten Miss Rosida ke Depan

C. *Stakeholder*

Dalam pelaksanaan kegiatan aktualisasi terdapat pihak-pihak yang terlibat. Berikut adalah pihak-pihak yang akan terlibat dalam pelaksanaan “Aktualisasi Optimalisasi Transformasi Digital Biro Persidangan II DPR RI Melalui Perancangan Konten Interaktif MISS ROSIDA” antara lain:

No	Stakeholders	Peran dalam Kegiatan Aktualisasi	Keterangan
1	Jacko Ryan, S.IP.	Pelaksana aktualisasi	CPNS Analis Kebijakan Ahli Pertama
2	Izzaty, S.T., M.E.	<i>Coach</i> yang membantu pembahasan	Widyaiswara Ahli Muda

		dalam penulisan laporan	
3	James Hezaro, S.M.	Mentor dalam pelaksanaan aktualisasi	Penelaah Teknis Kebijakan
4.	Wulan Imsakiyah, S.IP.	Narasumber wawancara analisis <i>benchmarking</i>	Biro Hukum
5.	Wudy Hiswara, S.Sos.	Narasumber wawancara analisis <i>benchmarking</i>	Pusat Analisis Keparlemenan
6.	Para responden survei di setiap Biro/Pusat	Membantu dalam pelaksanaan aktualisasi pengumpulan data yang dibutuhkan	-

Tabel V.7. Pemetaan *Stakeholder*

D. Kendala dan Strategi Menghadapi Kendala

Dalam pelaksanaan suatu kegiatan, seringkali terdapat kendala yang dapat mengganggu kelancaran kegiatan tersebut. Penulis mengidentifikasi beberapa kendala yang muncul dan strategi yang dapat diterapkan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut.

No	Kendala	Strategi Menghadapi Masalah
1	Keterbatasan infrastruktur digital (keterbatasan perangkat lunak/berbayar dengan durasi maksimal 8 detik pada setiap video)	- Menyusun <i>backup plan</i> (misalnya survei manual jika Google Form tidak dapat diakses) - Mengoptimalkan penggunaan aplikasi gratis/<i>opensource</i>
2	Kesulitan dalam menjaga keamanan dan etika digital (misalnya privasi data survei publik)	Menyertakan <i>disclaimer</i> pada survei terkait kerahasiaan data.
3	Kesulitan mengukur efektivitas konten karena <i>engagement</i> publik fluktuatif (jumlah views, komentar tidak stabil)	- Menggunakan beberapa indikator pengukuran (views, likes, komentar, partisipasi survei) - Membandingkan data dalam periode tertentu untuk melihat tren - Mengombinasikan dengan analisis lain (survei & <i>benchmarking</i>)
4	Partisipasi yang minim terkait pengisian survei dan penentuan informan	Memanfaatkan WhatsApp Group untuk menyebarkan informasi awal, dan melakukan konfirmasi dengan melakukan <i>personal-chatting</i> kepada calon informan dan responden
5.	Media sosial mengalami serangan siber (<i>phising</i>)	Menginventarisir usulan konten Miss Rosida ke depan berdasarkan hasil analisis (<i>benchmarking</i>, <i>engagement rate</i>, dan survei) yang ada

Tabel V.8. Pemetaan Kendala dan Strategi Penyelesaia

E. Analisis Dampak

Berikut adalah analisis dampak dari penerapan Optimalisasi Tranformasi Digital Biro Persidangan II DPR RI Melalui Perancangan Konten Interaktif MISS ROSIDA:

1. Dampak Jangka Pendek:

- a. Kemudahan Akses Informasi Publik: Implementasi QR Code dalam video membuat masyarakat lebih mudah mengakses survei maupun konten interaktif. Hal ini langsung meningkatkan engagement publik dalam waktu singkat.
- b. Peningkatan Partisipasi Awal Masyarakat: Publik mulai terbiasa memberikan masukan melalui Google Form maupun kolom komentar YouTube. Hal ini menjadi sinyal awal adanya ruang partisipasi dua arah.
- c. Peningkatan Kapasitas SDM ASN: Melalui benchmarking dan praktik langsung, pegawai memperoleh pengalaman penggunaan teknologi digital yang meningkatkan keterampilan kerja sehari-hari.

2. Dampak Jangka Menengah:

- a. Peningkatan Kualitas Layanan Persidangan: Konten persidangan yang dikemas populer dan mudah dipahami publik meningkatkan kualitas diseminasi informasi lembaga, sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat akan informasi yang jelas.
- b. Budaya Kerja Kolaboratif Digital: Terbentuknya tim lintas pihak yang aktif dalam produksi konten interaktif menumbuhkan kebiasaan kerja kolaboratif berbasis digital, mengurangi sekat antarbagian, serta meningkatkan sinergi.
- c. Pengembangan Literasi Digital Publik: Masyarakat terbiasa mengakses informasi persidangan melalui platform digital, yang meningkatkan literasi publik mengenai fungsi DPR dan proses legislasi.

5. Dampak Jangka Panjang:

- Penguatan Reputasi DPR RI sebagai Lembaga Modern: Pemanfaatan konten interaktif digital meneguhkan citra DPR sebagai lembaga yang adaptif terhadap teknologi dan terbuka pada partisipasi masyarakat.
- Peningkatan Kepercayaan Publik: Dengan layanan yang transparan, akuntabel, dan mudah diakses, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja DPR berpotensi meningkat secara bertahap.
- Kesiapan Menghadapi Disrupsi Digital Masa Depan: Melalui budaya kerja berbasis data, etika digital, dan keterampilan teknologi, organisasi lebih siap menghadapi tantangan transformasi digital jangka panjang, termasuk tuntutan publik yang semakin kompleks.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Transformasi digital merupakan keniscayaan dalam mewujudkan birokrasi modern yang responsif, transparan, dan partisipatif. Biro Persidangan II Sekretariat Jenderal DPR RI, sebagai unit pendukung fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran, memiliki peran strategis dalam menyajikan informasi persidangan yang akurat dan mudah diakses publik. Namun, pemanfaatan teknologi digital di biro ini masih terbatas pada penyampaian informasi satu arah, belum sepenuhnya interaktif, dan belum memaksimalkan partisipasi masyarakat.

Melalui perancangan konten interaktif MISS ROSIDA, kegiatan aktualisasi ini bertujuan mengoptimalkan transformasi digital agar layanan informasi persidangan menjadi lebih inklusif dan menarik. Pendekatan ini menjawab berbagai tantangan seperti keterbatasan kompetensi digital ASN, minimnya infrastruktur teknologi, serta belum adanya sistem evaluasi partisipasi publik yang terstruktur. Inovasi seperti pemanfaatan QR Code, survei daring, dan narasi populer diharapkan mampu meningkatkan *engagement* dan membangun dialog antara DPR dan masyarakat.

Aktualisasi ini selaras dengan nilai-nilai dasar ASN BerAKHLAK serta mendukung agenda SMART ASN, terutama dalam penguatan digital skills, digital culture, dan digital ethics. Optimalisasi MISS ROSIDA tidak hanya meningkatkan kualitas layanan informasi publik, tetapi juga memperkuat budaya kerja kolaboratif, akuntabilitas kinerja berbasis data, dan keterbukaan terhadap masukan publik. Aktualisasi ini diharapkan berkontribusi nyata terhadap visi dan misi Setjen DPR RI untuk mewujudkan dukungan persidangan yang profesional, modern, dan akuntabel. Dalam jangka panjang, inisiatif ini berpotensi memperkuat citra DPR sebagai lembaga legislatif yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perwakilan rakyat.

B. Saran

1. Memperkuat arah transformasi digital lembaga. Penguasaan dapat dilakukan dengan mengembangkan inovasi Miss Rosida dalam meningkatkan transparansi, efisiensi kerja, dan pelayanan publik DPR RI secara menyeluruh. Hal ini akan membantu lembaga beradaptasi dengan kebutuhan komunikasi publik modern yang lebih terbuka dan responsif.
2. Meningkatkan kualitas komunikasi publik. Komunikasi Publik dapat ditingkatkan dengan memastikan pesan yang disampaikan mudah dipahami oleh masyarakat umum dengan narasi yang ringan, visual menarik, dan gaya penyampaian yang ramah. Pendekatan komunikasi yang humanis akan membuat publik merasa lebih dekat dengan lembaga dan memahami fungsi DPR dengan lebih baik.
3. Mendorong partisipasi aktif masyarakat, di mana Miss Rosida menjadi jembatan dialog dua arah. Hal tersebut dapat dibangun melalui pelibatan publik dengan cara yang interaktif, seperti survei singkat, kolom komentar, atau ajakan memberikan pandangan terhadap isu aktual.
4. Memperkuat sinergi lintas unit dan bidang melalui kolaborasi. Hal ini akan memperkaya substansi konten serta memperluas jangkauan pesan lembaga. Serta membuat penerapan transformasi digital yang lebih komprehensif.
5. Membangun budaya evaluasi berkelanjutan dengan menjadikan survei, data tayangan, dan masukan publik sebagai dasar perbaikan konten dan strategi pengembangan transformasi digital ke depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). (2024, 24 Oktober). *Daftar pimpinan badan di DPR termasuk BAM yang siapampung aspirasi rakyat*. Diakses dari <https://emedia.dpr.go.id/2024/10/24/daftar-pimpinan-badan-di-dpr-termasuk-bam-yang-siap-tampung-aspirasi-rakyat/>
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029*. (2025). Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/314638/perpres-no-12-tahun-2025>
- Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang *Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal DPR RI*. (2021). Diakses dari https://berkas.dpr.go.id/jdih/document/peraturan_sekjen/2021persekjendpr006.pdf
- Rencana Strategis Deputy Bidang Persidangan Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2020–2024. (2020). Diakses dari <https://berkas.dpr.go.id/setjen/dokumen/reformasi-birokrasi-Deputi-Persidangan-Renstra-Deputi-Bidang-Persidangan-2020-2024-1631755229.pdf>
- Rencana Strategis Sekretariat Jenderal DPR RI (Perubahan Struktur Organisasi) 2020–2024. (2020). Diakses dari <https://old.dpr.go.id/publikasi/RENSTRA-Setjen-2020-2024.pdf>
- Sekretariat Jenderal DPR RI. (2025). *Rencana Strategis Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 2025–2029*. Jakarta: Setjen DPR RI.
- _____. (2024). *Proposal Inovasi Artificial Intelligence for Recommendation and Analytics*. Jakarta: Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat Setjen DPR RI.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang *Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045*. (2024). Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/299728/uu-no-59-tahun-2024>

LAMPIRAN

Lampiran I.

FORMULIR ALAT BANTU PENGENDALIAN RANCANGAN DAN PELAKSANAAN AKTUALISASI PELATIHAN DASAR CPNS ANGKATAN XVI TAHUN 2025

Nama : Jacko Ryan, S.IP.
Instansi : Sekretariat Jenderal DPR RI
NIP : 199907032025061001

Nama *Coach* : Izzaty, S.T., M.E.

No	Tanggal Pembimbingan	Isu atau Hal Yang Dibahas	Media Komunikasi	Rekomendasi Pembimbingan	Tanda Tangan Coach
1	19 Agustus 2025	Identifikasi isu di unit kerja dan pembahasan mengenai tugas agenda IV	<i>Zoom Meeting</i>	Memilih isu yang sesuai dengan tugas dan fungsi	
2	21 Agustus 2025	Penetapan Core Issue yang dipilih untuk rancangan aktualisasi	<i>Zoom Meeting</i>	Memperbaiki rancangan aktualisasi	
3	26 Agustus 2025	Simulasi presentasi rancangan aktualisasi	<i>Zoom Meeting</i>	Memperbaiki materi presentasi	
4	12 September 2025	Penyusunan <i>timeline</i> dan <i>benchmarking</i>	WhatsApp Chat & Call	Lanjutkan ke Tahap Berikut	
5	25 September 2025	Pembuatan Analisis ER & Survei	WhatsApp Chat & Call	Tambahkan analisis konten dan perdalam pertanyaan survei	
6	9 Oktober 2025	Penyampaian Laporan Survei dan Progress Laporan Bab V	WhatsApp Chat & Call	Mulai membuat <i>design</i> video dan <i>storyboard</i>	

7	24 Oktober 2025	Penyampaian Video dan Draft Laporan	WhatsApp Chat & Call	Persiapan presentasi	
8	27 Oktober 2025	Laporan Final Aktualisasi Latsar	Klasikal	Perbaikan pada Pelaksanaan Aktualisasi (Bab V)	

Lampiran II.

FORMULIR ALAT BANTU MENTORING PELAKSANAAN AKTUALISASI

Nama : Jacko Ryan
NIP 199907032025061001
Unit Kerja : Biro Persidangan II
Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Pertama
Isu Kegiatan : Belum teroptimalisasinya transformasi digital dalam mendukung kinerja di Biro Persidangan II Sekretariat Jenderal DPR RI pada tahun 2025

Kegiatan 1: Perencanaan (*Planning*)

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Mentor	Paraf Mentor
Tahapan kegiatan - Penyusunan <i>timeline</i> kerja dan rencana kerja serta rencana tindak lanjut Aktualisasi Pelatihan Dasar - Perancangan Konten Interaktif MISS ROSIDA <i>Benchmarking</i> dalam bentuk observasi singkat dan studi dokumen terkait pemanfaatan AI di unit kerja lain dalam lingkup Setjen DPR RI.	1. Lanjutkan pada tahapan kegiatan kedua	
Output kegiatan terhadap pemecahan isu <i>Timeline</i> kerja dan rencana kerja - Laporan observasi singkat		
Keterkaitan substansi mata pelatihan - Membangun hubungan yang baik dan saling menghargai antarunit kerja melalui kegiatan <i>benchmarking</i> dan berbagi praktik terbaik (harmonis). - Sinergi lintas unit kerja, seperti antara Biro Hukum dan Pusat Analisis Keparlemenan dalam mengembangkan inovasi berbasis kecerdasan buatan yang mendukung efektivitas kinerja organisasi secara keseluruhan (kolaboratif).		
Kontribusi terhadap visi-misi organisasi Terwujudnya dukungan analisis substansi yang professional dan akuntabel		

Penguatan nilai BerAKHLAK Harmonis, Kolaborasi		
--	--	--

Kegiatan 2: Mengorganisasi (*organizing*)

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Mentor	Paraf Mentor
Tahapan kegiatan 1. Terlibat dalam tim digital di Biro Persidangan II dalam pengelolaan konten MISS ROSIDA 2. Koordinasi dengan mentor dan coach dalam perencanaan, implementasi, dan evaluasi kebijakan Perancangan Konten Interaktif MISS ROSIDA	Melanjutkan ke tahapan ketiga	
Output kegiatan terhadap pemecahan isu 1. Hasil wawancara dengan <i>stakeholder</i> terkait		
Keterkaitan substansi mata pelatihan 1. Menggali informasi dari sumber yang kredibel dan memahami penerapan inovasi secara mendalam guna menghasilkan analisis yang akurat dan relevan (Kompeten)		
Kontribusi terhadap visi-misi organisasi Terwujudnya dukungan analisis substansi yang professional dan akuntabel		
Penguatan nilai BerAKHLAK Kompeten		

Kegiatan 3: Pengendalian (*controlling*)

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Mentor	Paraf Mentor
Tahapan kegiatan 1. Mengukur partisipasi dalam survei untuk menilai efektivitas 2. Mengukur peningkatan partisipasi masyarakat melalui analisis engagement sederhana (jumlah penyangan, komentar, pertanyaan, dan masukan yang masuk).	1. Melanjutkan ke tahapan keempat	
Output kegiatan terhadap pemecahan isu Hasil analisis <i>engagement rate</i> dan survei		
Keterkaitan substansi mata pelatihan 1. Pelaksanaan evaluasi berbasis data dan bukti nyata sebagai bentuk tanggung		

jawab terhadap keberlanjutan dan peningkatan kualitas inovasi Miss Rosid (Akuntabel)		
Kontribusi terhadap visi-misi organisasi 1. Terwujudnya dukungan analisis substansi yang professional dan akuntabel 2. Menjadi Sekretariat Jenderal yang Profesional dan Modern dalam mendukung Visi DPR RI		
Penguatan nilai BerAKHLAK Akuntabel		

Kegiatan 4: Pelaksanaan (*Actuating*)

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Mentor	Paraf Mentor
Tahapan kegiatan 1. Mengimplementasikan penayangan QR Code dalam video MISS ROSIDA sebagai kanal tindak lanjut interaksi publik melalui Google Form. 2. Menghasilkan narasi singkat yang selalu diakhiri pertanyaan terbuka untuk mendorong partisipasi di kolom komentar YouTube, dengan mengolah isu aktual AKD menjadi konten populer dengan bahasa sederhana yang mudah dipahami masyarakat. 3. Menyusun laporan Pelaksanaan Aktualisasi Optimalisasi Tranformasi Digital Biro Persidangan II DPR RI Melalui Perancangan Konten Interaktif MISS ROSIDA	1. Finalisasi bahan laporan Aktualisasi	
Output kegiatan terhadap pemecahan isu Video Konten & Laporan Final Aktualisasi		
Keterkaitan substansi mata pelatihan 1. Mengupayakan merespons perkembangan teknologi dan tren komunikasi digital dengan cara mengintegrasikan hasil analisis data ke dalam proses kreatif pembuatan konten (adaptif)		
Kontribusi terhadap visi-misi organisasi 1. Terwujudnya dukungan analisis		

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Mentor	Paraf Mentor
substansi yang professional dan akuntabel 2. Menjadi Sekretariat Jenderal yang Profesional dan Modern dalam mendukung Visi DPR RI		
Penguatan nilai BerAKHLAK Adaptif		

Lampiran III.**LAPORAN PELAKSANAAN AKSI BELA NEGARA PESERTA PELATIHAN DASAR CPNS 2025**

Angkatan XVI
Nama : Jacko Ryan
Instansi/Unit Kerja : Sekretariat Jenderal DPR RI/ Biro Persidangan II
Nama Mentor : James Hezaro, S.M.
Jabatan Mentor : Penelaah Teknis Kebijakan
Nilai dari Mentor **95**

No	Nilai Bela Negara	Indikator Sikap dan Perilaku	Aksi	Tempat	Waktu	Bukti	Paraf Mentor
1.	CINTA TANAH AIR	Mencintai, menjaga dan melestarikan lingkungan hidup	Membuang sampah berdasarkan pemilahan (organik/nonorganik/B3)	Semua tempat	6 Sept		
			Merapikan meja dan mengembalikan piring saat makan di kantin	Semua tempat	7 Okt		

No	Nilai Bela Negara	Indikator Sikap dan Perilaku	Aksi	Tempat	Waktu	Bukti	Paraf Mentor
		Menjaga dan memahami wilayah NKRI	Mengikuti kegiatan seminar kebangsaan	Menyesuaikan (sesuai acara)	18 Agt		
			Eksplorasi tempat kebudayaan/tempat bersejarah	Menyesuaikan	14 Sept		
2	SADAR BERBANGSA DAN BERNEGARA	Bangga terhadap bangsa dan negara sendiri	Memasang bendera merah putih saat Bulan Agustus	Rumah	9 Agt		
			Mengikuti Upacara HUT RI	Kantor	17 Agt		

No	Nilai Bela Negara	Indikator Sikap dan Perilaku	Aksi	Tempat	Waktu	Bukti	Paraf Mentor
		Menjalankan hak dan kewajiban sesuai hukum	Taat aturan dalam berlalu lintas	Semua tempat	5 Sept		
			Membayar pajak tepat waktu sesuai jatuh tempo	Online (platform aplikasi)	13 Sept		
3	SETIA KEPADA PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI NEGARA	Menjalankan kewajiban agama dan kepercayaan secara baik dan benar	Melakukan pelayanan dalam ibadah di Gereja	Gereja	12 Sept		
			Mengunjungi rumah ibadah lain dalam rangka memahami perbedaan & sikap toleransi	Rumah Ibadah	28 Sept		

No	Nilai Bela Negara	Indikator Sikap dan Perilaku	Aksi	Tempat	Waktu	Bukti	Paraf Mentor
							
		Menerapkan prinsip musyawarah dan mufakat	Melakukan urun rembug/diskusi saat pengambilan keputusan dalam kelompok Latsar CPNS	Kantor	9 Okt		
			Mengadakan forum keluarga untuk ambil keputusan penting bersama.	Rumah	21 Sept		
4.	RELA BERKORBAN UNTUK BANGSA DAN NEGARA	Menyumbangkan tenaga, pikiran, dan kemampuan untuk masyarakat dan kemajuan negara	Membuat konten tentang wawasan kebangsaan secara sukarela.	Media Sosial	17 Agt		

No	Nilai Bela Negara	Indikator Sikap dan Perilaku	Aksi	Tempat	Waktu	Bukti	Paraf Mentor
			Terlibat dalam kegiatan perayaan Hari Kemerdekaan di lingkungan RT/RW	Lingkungan Rumah	18 Agt		
		Mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi	Menyelesaikan pekerjaan penting walau harus lembur tanpa memanipulasi jam kerja.	Kantor	7 Okt		
			Ikut antrre dalam menggunakan layann publik/transportasi umum	Menyesuiakan	26 Sept		
5.	MEMILIKI KEMAMPUAN AWAL BELA NEGARA	Menjaga kesehatan fisik dan mental	Mengikuti olahraga/senam pagi	Kantor	30 Agt		

No	Nilai Bela Negara	Indikator Sikap dan Perilaku	Aksi	Tempat	Waktu	Bukti	Paraf Mentor
			Makan/minum makanan bergizi	Semua tempat	23 Sept		
		Memiliki kecerdasan emosional, spiritual, dan intelektual tinggi	Membuat konten positif di media sosial yang menyangkut isu-isu SARA.	Media Sosial	10 Okt		
			Aktif dalam diskusi publik/akademik soal demokrasi dan kebangsaan	Menyesuaikan acara	19 Sept	